

**EKSISTENSI ASURANSI KREDIT SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF
BAGI BANK DALAM MENGATASI RISIKO KREDIT MACET
(Studi di Perusda BPR Bank Pasar Klaten)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

Risna Budi Arta

NIM : E. 0004264

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**EKSISTENSI ASURANSI KREDIT SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF
BAGI BANK DALAM MENGATASI RISIKO KREDIT MACET
(Studi di Perusda BPR Bank Pasar Klaten)**

Disusun oleh :

RISNA BUDI ARTA

NIM : E.0004264

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

Co. Pembimbing

DJUWITYASTUTI, S.H
NIP. 130 814 527

PUJIYONO, S.H,M.Hum
NIP. 132 304 741

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**EKSISTENSI ASURANSI KREDIT SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF
BAGI BANK DALAM MENGATASI RISIKO KREDIT MACET
(Studi di Perusda BPR Bank Pasar Klaten)**

Disusun oleh :
RISNA BUDI ARTA
NIM : E.0004264

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 22 April 2008

TIM PENGUJI

1. AL.SENTOT SUDARWANTO, S.H,M.HUM. :
Ketua
2. ANJAR SRI CN, S.H, M.H. :
Sekretaris
3. DJUWITYASTUTI, S.H :.....
Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Moh. Jamin, S.H., M.Hum.

NIP. 131 570 154

ABSTRAK

RISNA BUDI ARTA, 2008. EKSISTENSI ASURANSI KREDIT SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF BAGI BANK DALAM MENGATASI RISIKO KREDIT MACET (Studi di Perusda BPR Bank Pasar Klaten). Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah asuransi kredit dapat menjadi salah satu alternatif bagi Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam mengatasi risiko kredit macet, dan kendala-kendala yang dihadapi Perusda BPR Bank Pasar Klaten di dalam asuransi kredit dan bagaimana solusinya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu di Perusda BPR Bank Pasar Klaten. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen dan lain-lain. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Perusda BPR Bank Pasar Klaten melakukan kerjasama dengan AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta untuk mengalihkan risiko atas kredit yang diberikan kepada masyarakat. Setiap calon debitur yang mengajukan kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten wajib ikut program asuransi kredit dan besarnya premi akan langsung dipotong saat realisasi kredit, apabila calon debitur tidak bersedia ikut dalam program asuransi kredit maka Perusda BPR Bank Pasar Klaten tidak akan memberikan kreditnya. Asuransi kredit diwajibkan di Perusda BPR Bank Pasar Klaten karena asuransi kredit merupakan salah satu alternatif atau upaya yang digunakan oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam mengatasi risiko kredit macet yang disebabkan karena debitur meninggal dunia sebelum kreditnya lunas, dimana pelunasan atas sisa kredit debitur tersebut akan dilunasi oleh pihak asuransi, yaitu AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta. Asuransi kredit juga memberikan keyakinan tambahan kepada Perusda BPR Bank Pasar Klaten terhadap kredit yang akan disalurkan pada masyarakat.

Kendala-kendala yang dihadapi Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam asuransi kredit, yaitu calon debitur tidak mengetahui tentang asuransi kredit, debitur meminta dibuatkan polis, dan kurangnya karyawan untuk mengurus asuransi kredit. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Perusda BPR Bank Pasar Klaten memberikan penjelasan di bagian *customer service* kepada setiap calon debitur tentang adanya asuransi kredit dan besarnya potongan premi untuk asuransi kredit, adanya penjelasan dari pihak bank bahwa perjanjian asuransi yang dilakukan adalah antara pihak bank dengan perusahaan asuransi sehingga polis yang ada adalah antara bank dengan perusahaan asuransi, adanya bantuan dari pihak AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta dalam memasukkan data atau mendata ulang debitur baru ke dalam daftar kepesertaan asuransi.

Implikasi penelitian ini yaitu Perusda BPR Bank Pasar Klaten menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi lain untuk mengatasi risiko kredit macet, bukan hanya dengan perusahaan asuransi jiwa. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk menekan angka kredit macet, sehingga akan meningkatkan tingkat kesehatan bank dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Perusda BPR bank Pasar klaten.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyanyang. atas segala limpahan rizki dan karunia-Nya kepada penulis serta tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan nilai-nilai kebenaran dan mencerahkan kita dari kegelapan.

Penulisan Hukum (skripsi) dengan judul "Eksistensi Asuransi Kredit Sebagai Salah Satu Alternatif Bagi Bank Dalam Mengatasi Risiko Kredit Macet (Studi di Perusda BPR Bank Pasar Klaten)" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan, terutama kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Prasetyo Hadi P, S.H., MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan dukungan kepada para mahasiswa.
3. Ibu Ambar Budi S, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan bantuan dan izin kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ibu Djuwityastuti, S.H. dan Bapak Pujiyono, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan, saran, serta arahan untuk menyempurnakan isi Penulisan Hukum ini.
5. Bapak Sutedjo, S.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan dukungan kepada Penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Ir. Untung Sriyanto selaku Direktur Utama Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

7. Bapak Nugroho Wahyudi R,S.E. selaku Direktur Perusda BPR Bank Pasar Klaten.
8. Bapak Edy Priyanto,B.Sc selaku Kabag Kredit Perusda BPR Bank Pasar Klaten. Terima kasih Pak, atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis.
9. Ibu Heny Mulat Rahayu,S.E., selaku Kasubag Kredit Karyawan Perusda BPR Bank Pasar Klaten.
10. Ibu Ninik, selaku Kasubag Kredit Umum Perusda BPR Bank Pasar Klaten.
11. Ibu Dewi Ekosari K,S.E.,MM selaku Kasubag Analis Kredit Perusda BPR Bank Pasar Klaten.
12. Seluruh Staf Sub Bagian Kredit Karyawan dan Staf Sub bagian Kredit Umum atas keramah tamahan dan kesabarannya dalam memberikan keterangan kepada penulis, Ibu Retno Catur Dewi, Bapak Moersid, Bapak Wilapa.
13. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
14. Seluruh staf Fakultas Hukum UNS yang telah membantu Penulis selama menjadi mahasiswa.
15. Bapak, Ibu, Riska adikku yang kucintai...Terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, doa, dan nasehatnya.
16. Pandawa Lima dari SMP N 3 Klaten (Susila, Sukasno, Sutikno, Gojali) dan Pandawa Lima dari SMA N 2 Klaten (Wawan, Wahyu, Purwaka, Danang). Kalian semua adalah keluarga keduaku, terimakasih atas dukungan, nasehat, motivasi, serta persahabatan kita selama ini hingga ujung usia kita.....Jangan lupakan persahabatan kita.
17. Buat Sahabat-sahabatku dikontrakan Griya Novita, Prima, Adi Tri, Saputra Kesit, Agung, Bulin, Andika, Ponxi, Gilang, Roni Desi, Aersad terima kasih buat semuanya ya....kalian telah memberi warna dan pengalaman dalam hidupku...
18. Temen-temenku di BROTHER MUSIC STUDIO.....Arif semangat kuliahnya ya !!!!! Mas Heri dan Mas Dodik semoga cepat dapat kerjaan !!!! Terima kasih atas tempat yang sudah disediakan buat kos ku yang kedua.

19. Teman-teman angkatan 2004.....Aan dan Agus Sucipto atas saran dan masukannya, Sari, Mami, Rita, Rosana, Wuri, Rosita, Tri, Uci, Tika, Lia Tumini, Anik, Rohmat, Yudo, Andi, anak-anak futsal 2004 dan rekan-rekan seperjuangan yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.....Viva Justitia
20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun Penulisan Hukum ini baik secara moril maupun materiil.

Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam Penulisan Hukum ini. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, terutama untuk kalangan mahasiswa.

Surakarta, April 2008
Penulis

RISNA BUDI ARTA
NIM. E 0004264

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	13
1. Tinjauan Mengenai Perjanjian	
a. Pengertian Perjanjian	13
b. Unsur-Unsur Perjanjian.....	13
c. Syarat Sahnya Perjanjian	14
d. Prestasi dan Wanprestasi.....	17
2. Tinjauan Mengenai Bank	
a. Pengertian Bank	18
b. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank	19
c. Penggolongan Bank	19
d. Kegiatan Usaha Bank.....	21
3. Tinjauan Mengenai Kredit	
a. Pengertian Kredit	23
b. Unsur-Unsur Kredit.....	23
c. Tujuan dan Fungsi Kredit	25

d. Jenis-Jenis Kredit	26
e. Jaminan Kredit	27
f. Prinsip-Prinsip Perkreditan	28
g. Perjanjian Kredit	30
4. Tinjauan Mengenai Asuransi	
a. Pengertian Asuransi	31
b. Tujuan Asuransi	33
c. Jenis-Jenis Asuransi	34
d. Perjanjian Asuransi	34
e. Syarat Perjanjian Perjanjian Asuransi.....	35
f. Asas-Asas Perjanjian Perjanjian Asuransi	35
5. Tinjauan Mengenai Asuransi Kredit	
a. Pengertian Asuransi Kredit	37
b. Tujuan Asuransi Kredit.....	37
c. Asuransi Jiwa Kredit.....	38
d. Asuransi untuk Kepentingan Pihak Ketiga	39
B. Kerangka Pemikiran.....	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Perusda BPR Bank Pasar Klaten.....	43
2. Stuktur Organisasi Perusda BPR Bank Pasar Klaten.....	45
3. Kegiatan Usaha Perusda BPR Bank Pasar Klaten	48
4. Prosedur Pemberian Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten	50
5. Pengawasan Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten	53
2) Asuransi Kredit sebagai Salah Satu Alternatif bagi Bank dalam Mengatasi Risiko Kredit Macet.....	57
3) Kendala-Kendala yang dihadapi Perusda BPR Bank Pasar Klaten di dalam asuransi Kredit.....	73

BAB V PENUTUP

 A. Simpulan 75

 B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang sedang berkembang di dunia ini. Negara berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global. Penerapan istilah negara berkembang ke seluruh negara yang kurang berkembang dianggap tidak tepat bila kasus negara tersebut adalah sebuah negara miskin, yaitu negara yang tidak mengalami pertumbuhan situasi ekonominya, dan telah mengalami periode penurunan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia bersama negara berkembang lainnya yang tergabung dalam G11 (Argentina, Bolivia, Republic of Venezuela, Brazil, Egypt, India, Indonesia, Namibia, Philippines, South Africa dan Tunisia) berusaha untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan agar dapat minimal sejajar dengan negara lain di dunia seperti Amerika, Cina, Jepang dan sebagainya (<http://ipasatucommunity.wordpress.com>).

Sebagai tindakan yang konkrit untuk mengatasi hal tersebut Negara Indonesia yang dalam hal ini adalah Pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan agar dapat mensejajarkan diri dengan negara-negara lain di dunia. Pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia merupakan suatu bentuk pengamalan Pancasila dan UUD 1945, dengan kata lain pembangunan nasional dilaksanakan dengan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang diarahkan kepada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spirituil. Dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sebagai acuan dalam pembangunan negara, ditegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata.

Pembangunan nasional dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya atau dana yang sangat besar. Dana tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber dana, salah satu sumber dana dapat diperoleh dari bank melalui kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat, baik yang disalurkan oleh pemerintah maupun bank swasta. Berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan di dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Tugas utama bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat salah satunya dalam bentuk kredit. Kredit bank inilah yang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan, sedangkan untuk membantu pelaksanaan pembangunan tersebut, maka diperlukan kebijakan dari pemerintah dalam pemberian fasilitas kredit, yang mana sangat diperlukan oleh pengusaha-pengusaha sebagai tambahan modal, khususnya pengusaha kecil yang mempunyai modal terbatas dalam kegiatan usahanya untuk dapat mengembangkan usahanya. Dengan adanya kebijaksanaan yang longgar dalam pemberian fasilitas kredit, maka kegiatan usaha akan menjadi maju sehingga dapat memberi pengaruh untuk meningkatkan taraf perekonomian negara.

Kredit diberikan oleh bank didasarkan atas rasa percaya (*believe/trust*) bahwa si debitur (penerima kredit) akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara kreditur (pemberi kredit) yang dalam hal ini adalah pihak bank dan debitur (penerima kredit) yang dalam hal ini adalah orang, yang bisa berarti individu atau badan hukum. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, dan untuk mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit maka diperlukan jaminan pemberian kredit, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Berdasarkan penjelasan yang ada dalam Pasal 8 menegaskan bahwa setiap bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dan harus yakin akan

kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank yang bersangkutan harus pula melakukan penilaian dengan seksama atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Jadi, agunan hanya merupakan salah satu unsur dalam pemberian kredit, sehingga jika unsur-unsur lain telah memberikan keyakinan tersebut, maka agunan tetap diwajibkan, tetapi hanya berbentuk barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Walaupun sebenarnya bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan dengan objek yang dibiayai, yang sering dikenal dengan “agunan tambahan”. Faktor adanya jaminan inilah yang penting dan harus diperhatikan oleh bank, sebab pemberian jaminan tersebut berfungsi memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan atas hutang bila debitur cidera janji tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Persoalan dalam kredit muncul, ketika para pengusaha yang memerlukan modal usaha untuk mengembangkan usahanya mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam pembayaran angsuran kreditnya terhadap pihak bank, sebagaimana jangka waktu pengembalian kredit yang telah diperjanjikan antara debitur peminjam dengan bank. Dalam hal pengusaha atau debitur mengalami tunggakan dalam pelunasan kredit maka akan terjadi risiko yang tidak diharapkan oleh pihak bank, yaitu terjadinya kredit macet. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, tampak indikasi kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) masih cukup tinggi. Memang tidak setinggi pada tahun 2000 yang sempat mengganjal kinerja perbankan dengan NPL 20,1 %. Tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan, tahun 2003 sebesar 6,8 %, tahun 2004 tinggal 4,5 %, tahun 2005 meningkat menjadi 7,6 %, tapi tahun 2006 menurun lagi menjadi 6,07 %, dan tahun 2007 tinggal 14,07 %. Celakanya, sebagian besar NPL mengendap pada bank pelat merah, yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp.56,3 triliun, dimana 72 % atau senilai Rp.40,6 triliun berada di bank BUMN (<http://g1s.org/blog/amnesia-kredit-perbankan-802/>). Data Bank Indonesia Solo menunjukkan bahwa nilai kredit macet, terutama pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Solo tingkat kredit macetnya

(*NonPerformingLoan*) cenderung meningkat. Berdasarkan catatan Bank Indonesia Solo, nilai kredit macet ini melebihi ambang batas yang ditetapkan bank sentral sebesar 5 %. Data yang dikeluarkan Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Solo, menyebutkan kredit macet 89 BPR mencapai 14,01 %. Jumlahnya naik bila dibandingkan tahun lalu, 13,31 % atau pada 2006 yaitu 8,23 %. Dibandingkan dengan bank umum lainnya yang rata-rata 5,17 %, jumlah kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lumayan besar (<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/04/2007/04/26/brk>). Kredit macet yang terjadi pada suatu bank akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank, karena uang yang disalurkan kepada masyarakat melalui kredit terlambat kembalinya sehingga bank akan kesulitan untuk melakukan kegiatan usahanya.

Peranan lembaga asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non perbankan yang mempunyai fungsi untuk mengalihkan risiko dan memberikan ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang tidak tentu, menjadi sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Asuransi mempunyai arti penting bagi bank untuk mengatasi risiko kredit macet yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kredit. Dalam hal ini bank dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk mengamankan kredit yang disalurkan ke masyarakat. Berdasarkan hubungan kerjasama tersebut, maka bank dapat memberikan kredit kepada debitur secara aman, karena bila terjadi risiko kredit macet akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dapat dikatakan bahwa bank dan perusahaan asuransi melakukan suatu perjanjian timbal balik, di satu sisi perusahaan asuransi berusaha menanggung kerugian dan di sisi lain bank harus membayar premi sesuai yang diperjanjikan, premi yang dibayarkan bank kepada perusahaan asuransi di ambil dari kredit yang diajukan debitur, yang mana besarnya premi ditentukan oleh perusahaan asuransi. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Melalui asuransi, kemungkinan kerugian yang disebabkan selama pelaksanaan pemberian kredit dapat diasuransikan, sehingga apabila risiko tidak diharapkan akhirnya terjadi, maka perusahaan asuransi akan menutup sisa atau kekurangan kredit yang belum terbayar secara sekaligus dan bank tidak akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kredit macet.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menulis penulisan hukum dengan judul:

“EKSISTENSI ASURANSI KREDIT SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF BAGI BANK DALAM MENGATASI RISIKO KREDIT MACET (Studi di Perusda BPR Bank Pasar Klaten)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah asuransi kredit dapat menjadi salah satu alternatif bagi Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam mengatasi risiko kredit macet?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Perusda BPR Bank Pasar Klaten di dalam asuransi kredit dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini dapat dibagi dalam dua hal, yaitu :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui apakah asuransi kredit dapat menjadi salah satu alternatif bagi Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam mengatasi risiko kredit macet.
 - b. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Perusda BPR Bank Pasar Klaten di dalam asuransi kredit dan solusinya.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penelitian hukum sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

- b. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang hukum perdata khususnya hukum perbankan dan hukum asuransi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Mendapatkan masukan yang diharapkan dapat digunakan untuk almamater dalam mengembangkan bahan perkuliahan yang ada.
- b. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama Hukum Perbankan dan Hukum Asuransi.
- c. hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian lainnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan judul penelitian ini.
- c. Membantu memberikan pemahaman mengenai asuransi kredit salah satu alternatif yang digunakan perbankan dalam mengatasi risiko kredit macet.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2006: 43). Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Pada penelitian empiris, maka

yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006: 52). Dalam penelitian hukum empiris, peneliti perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga tidak cukup hanya dengan mengumpulkan data-data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris sehingga penulis mengambil lokasi penelitian di Perusda BPR Bank Pasar Klaten yang beralamat di Jalan Veteran No 140 Klaten.

5. Jenis Data

Jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan atau sumber pertama;
- b. Data Sekunder, yaitu data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Termasuk di dalam sumber data ini adalah keterangan pihak pejabat dan para staf dari Perusda BPR Bank Pasar Klaten yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c) Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
- d) Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 34 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.8 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Klaten.
- g) Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten.
- h) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten Nomor: PD BPR BP/SK/Dir/32/VII/2004 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten.

- i) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten Nomor: PD BPR BP/SK/Dir/49/VII/2005 tentang Prosedur Pemberian Kredit di Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten.
- j) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten Nomor: PD BPR BP/Ped/Dir/41/VII/2007 tentang Plafond Kredit dan Borg yang diperlukan pada Sub Bagian Kredit Karyawan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, koran, makalah, dan majalah berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

a. Studi Lapangan

Penulis datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara melakukan wawancara mendalam (*Indepth interviewing*). Wawancara jenis ini terbuka, tidak berstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan dapat dilakukan berulang pada responden yang sama. Teknik ini akan dilakukan pada semua responden dan responden dalam penelitian hukum ini adalah para pejabat dan staf dari Perusda BPR Bank Pasar Klaten antara lain : Kepala Bagian Kredit Perusda BPR Bank Pasar Klaten, Kepala Sub Bagian Kredit Karyawan Perusda BPR Bank Pasar Klaten, Kepala Sub Bagian Kredit Umum Perusda BPR Bank Pasar Klaten, Kepala Sub Bagian Analisa Kredit Perusda BPR Bank Pasar Klaten, Staf Sub Bagian Kredit

Karyawan Perusda BPR Bank Pasar Klaten, dan Staf Sub Bagian Kredit Umum Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah tehnik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 1999 : 8). Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data (*fieldnote*).

b. Penyajian Data

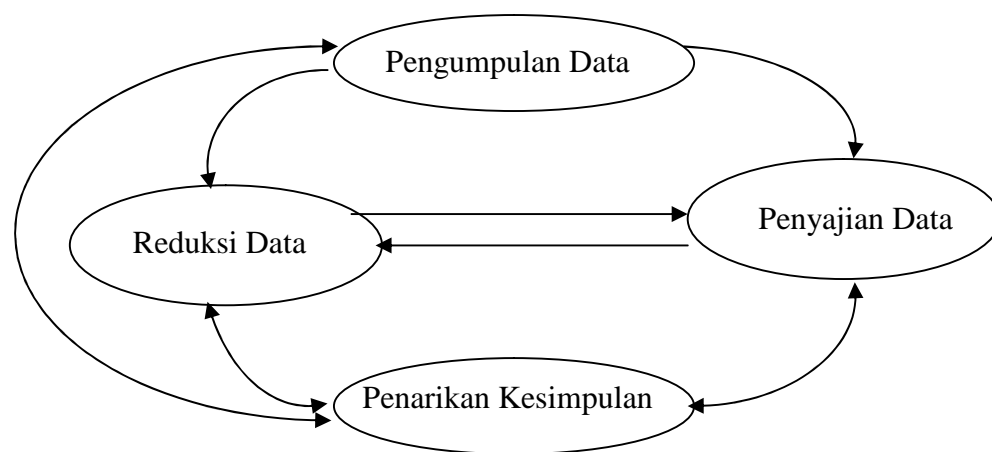
Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang

mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi.

Teknik analisis kualitatif dapat digambarkan dalam bentuk rangkaian yang utuh antara ketiga komponen diatas (reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasinya). Adapun skema teknik analisis kualitatif dengan interaktif model adalah sebagai berikut :



Bagan 1

Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian, penulis membuat reduksi data dan sajian data. Dan setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan memverifikasikan berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas yang dilakukan dengan siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapat data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam hal ini memuat latar belakang mengenai eksistensi asuransi kredit sebagai salah satu alternatif bagi bank dalam mengatasi resiko kredit macet, perumusan yang merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pedoman peneliti untuk menganalisa data dalam pembahasan, tujuan dan kegunaan penelitian yang berisi tujuan obyektif dan tujuan subyektif serta manfaat teoritis dan manfaat praktis, metode penelitian berisi mengenai jenis, sifat, pendekatan, dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, tahap analisis data, dan sistematika skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini memuat teori-teori kepustakaan yang menjadi landasan penelitian dan menjadi pendukung dalam pemecahan masalah yang meliputi tinjauan mengenai perjanjian, tinjauan mengenai bank, tinjauan mengenai kredit, tinjauan mengenai asuransi, dan tinjauan mengenai asuransi kredit serta berisi tentang kerangka pemikiran.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini memuat tentang analisis tentang penelitian dan pembahasan yang meliputi asuransi kredit sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan bank dalam mengatasi resiko kredit macet, kendala-kendala yang dihadapi dalam asuransi kredit dan solusinya.

BAB IV: PENUTUP

Dalam hal ini memuat mengenai simpulan yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang ditujukan kepada semua pihak yang bersangkutan dengan perkembangan hukum dan ilmu hukum khususnya mengenai kredit yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Mengenai Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menentukan:

” Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Para sarjana juga telah banyak membahas dan memberikan definisi perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Subekti yaitu:

”Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal” (Subekti, 1993: 225).

Wirjono Prodjodikoro juga memberikan definisi mengenai perjanjian, yaitu:

“perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang” (A Qirom Meliala Syamsudin, 1985 : 8).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya, dimana dua orang atau lebih tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (prestasi).

b. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian memuat 3 (tiga) unsur, yaitu :

- 1) Unsur Esensialia, yaitu bagian-bagian yang harus dimuat dalam suatu perjanjian dan harus dicantumkan secara tegas dalam perjanjian tersebut.

- 2) Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang secara diam-diam dianggap ada dalam perjanjian. Syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian, namun tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itupun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan perjanjian menjadi tidak mengikat, apabila tidak diatur dalam perjanjian maka peraturan perundang-undangan akan mengisi kekosongan yang terjadi, kecuali diatur dalam perjanjian.
- 3) Unsur *Accidentalia*, yaitu bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak dan oleh undang-undang dibiarkan atau tidak dilarang, artinya klausula yang dimasukkan para pihak tidak dilarang undang-undang.

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, ada 4 (empat) yang terdiri dari :

- 1) Adanya sepakat dari yang membuat perjanjian.
- 2) Adanya kecakapan bagi yang membuat perjanjian.
- 3) Adanya suatu hal tertentu atau obyek perjanjian.
- 4) Adanya suatu sebab yang halal atau kausa yang halal.

Syarat nomor 1 dan nomor 2 adalah syarat subyektif karena menyangkut subyek perjanjian. Syarat nomor 3 dan nomor 4 adalah syarat obyektif karena menyangkut obyek atau isi perjanjian. Syarat subyektif jika tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, kalau syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian). Keterangan lebih lanjut dari syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, sebagai berikut :

a) Adanya kata sepakat

Kata sepakat dalam perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak atau lebih saling diterima satu sama lain. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian itu telah ada, dan sejak saat itu perjanjian telah mengikat para pihak dan dapat dilaksanakan.

b) Kecakapan untuk membuat perjanjian

Kecakapan adalah kemampuan membuat perjanjian. Pasal 1329 KUHPerdota menyebutkan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian. Pasal 1330 KUHPerdota menyatakan bahwa mereka yang tidak cakap adalah :

(1) Orang yang belum dewasa

Orang yang belum dewasa, dalam Pasal 330 KUHPerdota menyatakan bahwa “mereka yang belum dewasa adalah yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah”. Orang yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah maka dianggap telah dewasa dan apabila perkawinan mereka bubar sebelum umur genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Dalam perkembangannya umur kedewasaan berubah, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 47 ayat 1 yang menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menentukan umur kedewasaan adalah 18 tahun yaitu terdapat dalam Pasal 39 jo Pasal 40 yang pada intinya bahwa penghadap dan saksi paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah. Berdasarkan ketentuan tersebut belum dewasa adalah belum berumur 18 tahun dan belum menikah dengan dasar undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama.

(2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, seseorang yang ditaruh dibawah pengampuan manakala secara umur dia sudah cakap (sudah dewasa), tetapi secara mental dia tidak cakap, sehingga dia harus diwakili oleh orang tua atau wali. Hal ini diatur

di dalam Pasal 433 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah orang-orang yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap walaupun kadang-kadang cakap mempergunakan pikiran serta orang yang boros”. Seseorang ditaruh di bawah pengampuan setelah ada putusan hakim.

- (3) Perempuan yang menikah, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Perempuan yang menikah dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam lapangan keperdataan, karena ini terkait dengan harta yang dikelola yang berwenang hanya suami sendirian. Pasal 124 KUHPerdara menyatakan bahwa “dalam suatu perkawinan yang berhak mengelola harta kekayaan suami sendirian”, oleh karena itu istri dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan. Dalam Pasal 108 KUHPerdara dan 110 KUHPerdara mengatur bahwa orang perempuan yang menikah tidak cakap dalam lapangan hukum harta kekayaan. Pada tahun 1963 ada ketentuan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 1963 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Negeri (PN) yang salah satu isinya adalah anjuran kepada hakim PN dan PT agar tidak menerapkan dan menggunakan pasal-pasal tertentu antara lain Pasal 108 KUHPerdara dan 110 KUHPerdara, sehingga sejak adanya SEMA No. 3 tahun 1963, maka perempuan yang menikah boleh dan cakap untuk mengadakan suatu perjanjian.

- c) Adanya suatu hal tertentu atau objek perjanjian

Dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik.

- d) Suatu sebab yang halal

Maksud dari sebab yang yang halal disini adalah isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara).

d. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur dalam setiap perikatan. Debitur atau pihak yang berhutang berkewajiban melaksanakan prestasi. Bentuk prestasi dalam Pasal 1234 KUHPdata ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1) Memberi, prestasinya untuk memberi
- 2) Berbuat, prestasinya berbuat
- 3) Tidak berbuat, prestasinya untuk tidak berbuat.

Tidak terpenuhinya suatu prestasi dapat terjadi karena 2 kemungkinan, yaitu :

- 1) Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun tidak sengaja.
- 2) Karena keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu merupakan hal-hal diluar kemampuan debitur.

Ada kalanya prestasi tersebut tidak dilakukan, yang berakibat pada wanprestasi. Ada beberapa pendapat dari para pakar yang menyebutkan tentang pengertian wanprestasi antara lain :

- 1) Menurut Subekti

Wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya.

- 2) Menurut Yahya Harahap

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila ia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya (M.Yahya Harahap,1986: 60).

Jadi wanprestasi merupakan tidak terlaksananya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.

2. Tinjauan Mengenai Bank

a. Pengertian Bank

Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 memberi definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut segi terminologi kata “bank” berasal dari bahasa Italy yaitu “*banca*”, yang berarti *bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar (Munir Fuady, 2003:13).

Menurut Syarif Arbi, bank adalah lembaga keuangan yang usahanya menyerap dana dari kelompok masyarakat yang berlebihan dana dan menyalurkan kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan dana tersebut serta memenuhi persyaratan tertentu untuk diberikan bantuan dana tersebut (Syarif Arbi, 2003: 5-6), sedangkan menurut A. Abdurrahman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan lain (Munir Fuady, 2003:13).

Dari semua pengertian tentang bank di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan atau yang melaksanakan kegiatan di bidang keuangan seperti memberikan pinjaman, menerima deposito uang, menerbitkan uang, mengedarkan uang dan menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, serta melakukan segala kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keuangan.

b. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank mempunyai asas, fungsi dan tujuan sebagai berikut:

1) Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2) Fungsi

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

3) Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

c. Penggolongan Bank

Bank di Indonesia saat ini terdiri dari berbagai macam jenis seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman ini mendorong kepada semakin berkembangnya pola sisi kehidupan manusia, sehingga memunculkan berbagai jenis bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Kasmir jenis-jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi:

1) Dilihat dari segi fungsinya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan maka jenis perbankan terdiri dari :

- a) Bank Umum, di dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa “ Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

- b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), di dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

2) Dilihat dari kepemilikannya

Hal ini berarti siapakah pemilik dari bank tersebut, hal ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan, yaitu :

- a) Bank milik pemerintah, dalam hal ini bisa berarti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu bank yang akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah, contoh Bank Milik Pemerintah Pusat: Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan lain-lain.
- b) Bank Milik Swasta Nasional, yaitu bank yang akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh swasta sehingga keuntungannya dimiliki oleh swasta pula, contoh : Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Lippo, Bank Muamalat, dan lain-lain.
- c) Bank Milik Koperasi, saham ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, contoh Bank Umum Koperasi Indonesia.
- d) Bank Milik Asing, ini adalah cabang dari bank yang berasal dari luar negeri baik milik pemerintah asing maupun swasta asing, sehingga kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing/luar negeri, contoh : ABN Amro Bank, Bank of Tokyo, City Bank, dan lain-lain.
- e) Bank Milik Campuran, bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta nasional dan pihak asing. Kepemilikan saham mayoritas oleh Warga Negara Indonesia, contoh : Ing Bank, Inter Pacifik Bank, Mitsubishi Buana Bank, dan lain-lain.

3) Dilihat dari segi status

Status disini menunjukkan ukuran kemampuan bank untuk melayani masyarakat baik dilihat dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah:

- a) Bank Devisa, yaitu bank yang melayani transaksi ke luar negeri, yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, dan lain-lain. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
- b) Bank Non Devisa, yaitu bank yang hanya melayani transaksi yang masih dalam batas-batas negara dan tidak mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri.

d. Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang meliputi kegiatan usaha bank umum dan kegiatan usaha bank perkreditan rakyat. Adapun usaha bank umum meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: surat-surat wesel, Surat pengakuan hutang, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- 6) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- 7) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- 8) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

- 9) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- 10) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 11) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang diatur di dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Muhamad Djumhana dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan Di Indonesia mengemukakan bahwa kegiatan usaha bank disesuaikan dengan jenis banknya, seperti kegiatan bank konvensional akan sangat berbeda dengan kegiatan usaha bank yang menggunakan prinsip syariah. Menurut Djumhana masih dalam buku yang sama, secara umum kegiatan usaha bank meliputi:

- 1) Pengumpulan dana.
- 2) Pemberian kredit.
- 3) Mempermudah sistem pembayaran dan penagihan.
- 4) Pemberian jasa keuangan lainnya, seperti pemberian bank garansi, melakukan kegiatan penyertaan modal, dan lain-lain.

3. Tinjauan Mengenai Kredit

a. Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit dalam bahasa Latin disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya (Kasmir, 2004:101). Menurut Drs. OP. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang (Budi Untung, 2000: 1)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pinjaman adalah penyaluran uang atau dana berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pemberi kredit (pihak bank) dengan pihak penerima kredit (pihak lain). Menimbulkan kewajiban bagi pihak penerima kredit (peminjam) untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, yang mana didasarkan pada kepercayaan dan adanya hubungan timbal balik antara kreditur dan debitur.

b. Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud atau unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu, sehingga jika berbicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2004:103):

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2) Kesepakatan

Didalam kredit mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4) Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besarnya risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

5) Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga, sedangkan untuk bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan sistim bagi hasil.

c. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Dalam prakteknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut (Kasmir, 2004:105):

1) Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

2) Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3) Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit secara luas tersebut antara lain (Kasmir, 2004:106):

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang
- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang

- 4) Untuk meningkatkan peredaran barang
- 5) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- 6) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- 7) Untuk meningkatkan hubungan internasional
- 8) Sebagai alat stabilitas ekonomi

d. Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Dalam prakteknya kredit yang diberikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2004:109):

- 1) Dilihat dari segi kegunaan
 - a) Kredit Investasi, kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - b) Kredit Modal Kerja, kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- 2) Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a) Kredit Produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.
 - b) Kredit Konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.
 - c) Kredit Perdagangan, kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya.
- 3) Dilihat dari segi jangka waktu
 - a) Kredit Jangka Menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
 - b) Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas 3 atau 5 tahun.

- 4) Dilihat dari segi jaminan
 - a) Kredit dengan Jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
 - b) Kredit tanpa Jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
- 5) Dilihat dari segi sektor usaha, meliputi: Kredit Pertanian, Kredit Peternakan, Kredit Industri, Kredit Pertambangan, Kredit Pendidikan, Kredit Profesi, Kredit Perumahan.

e. Jaminan Kredit

Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut (Kasmir, 2002: 102):

- 1) Kredit dengan Jaminan
 - a) Jaminan benda berwujud, yaitu jaminan dengan barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti: Tanah, bangunan, kendaraan bermotor, barang dagangan, dan lainnya
 - b) Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dapat dijadikan jaminan seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, wesel, dan surat tagihan lainnya.
 - c) Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala risiko apabila kredit tersebut macet.
- 2) Kredit tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Kredit tanpa

jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

f. Prinsip-Prinsip Perkreditan

Peluncuran kredit oleh suatu bank mestilah dilakukan dengan berpegangan pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip kepercayaan

Setiap pemberian kredit seharusnya diberikan berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya.

2) Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank itu sendiri (internal) maupun oleh pihak luar (external), *in casu* oleh pihak Bank Sentral. Berdasarkan kewenangan pengawasan oleh Bank Sentral ini, maka Bank Sentral menetapkan pula batas maksimum pemberian kredit (*Legal Lending Limit*) terhadap orang atau kegiatan atau kelompok peminjam tertentu.

3) Prinsip 5 C

Prinsip 5C adalah singkatan dari unsur-unsur *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Conditions of Economy*, dan *Collateral*. Untuk penjelasannya antara lain:

a) *Character* (Kepribadian)

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian atau watak dari calon debiturnya, karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang jelek pula. Perilaku yang jelek ini termasuk tidak mau membayar hutang.

Karena itu, sebelum kredit diluncurkan, harus terlebih dahulu ditinjau apakah calon debitur berkelakuan baik, tidak terlibat tindakan-tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk, atau tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya.

b) *Capacity* (Kemampuan)

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar.

c) *Capital* (Modal)

Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon krediturnya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan untuk melunasi kredit.

d) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur. Misalnya, jika bisnis debitur adalah di bidang bisnis yang selama ini diproteksi atau diberikan hak monopoli oleh pemerintah. Jika misalnya terdapat perubahan *policy* dimana pemerintah mencabut proteksi atau hak monopoli, maka pemberian kredit terhadap perusahaan tersebut mesti ekstra hati-hati.

e) *Collateral* (Agunan)

Agunan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam setiap pemberian kredit. Agunan merupakan *the last resort* bagi kreditur, dimana akan direalisasikan/ dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

Bank telah menerapkan prinsip-prinsip perkreditan dan melakukan analisa kredit semaksimal mungkin agar kredit-kredit yang telah dikeluarkan dapat kembali sepenuhnya tapi kemungkinan terjadinya kredit macet masih saja terjadi. Dalam hal kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi bank. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain (Kasmir, 2002: 116-117):

1) *Rescheduling*

- a) Memperpanjang jangka waktu kredit
- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

2) *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti:

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- c) Penurunan suku bunga
- d) Pembebasan bunga

3) *Restructuring*

- a) Dengan menambah jumlah kredit
- b) Dengan menambah *equity*

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

5) Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiked baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

g. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat konsensual. Arti konsensual ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh adanya kesepakatan antara pihak bank dengan debitur (Budi Untung, 2000: 29). Bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama, disesuaikan

dengan kebutuhan masing-masing sehingga perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk tertentu. Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit pada umumnya berbentuk perjanjian baku. Bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedang debitur hanya mempelajari dan memahami dengan baik isinya, di sini posisi debitur lemah karena hanya bisa menerima atau menolak isi perjanjian tanpa ada kemungkinan untuk melakukan tawar-menawar.

Menurut Remy Sjahdeini yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausa-klausanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan (Johanes Ibrahim, 2004: 35). Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit merupakan dasar hubungan kontraktual antara para pihak dan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut C. H. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, antara lain (Hermansyah, 2005: 68):

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya.
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

4. Tinjauan Mengenai Asuransi

a. Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi dirumuskan dalam KUHD Pasal 246 sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu”.

Pengertian asuransi juga diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 angka (1) yang merumuskan:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko tersebut terjadinya adalah belum pasti terjadinya karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti pula, sedangkan pengertian asuransi juga selalu didukung pengertian risiko, kiranya hal ini sudah merupakan suatu pengertian yang lazim, seperti pendapat-pendapat para sarjana, antara lain (Sri Rejeki Hartono, 2001: 12-13):

- 1) James L. Athearn, dalam bukunya *Risk and Insurance* mengatakan bahwa asuransi itu adalah suatu institut yang direncanakan guna menangani risiko.
- 2) Robert I. Mehr dan Emerson Cammack juga mengatakan, bahwa suatu pemindahan risiko itu lazim disebut sebagai asuransi.
- 3) Prof. Ny. Emmy Pangaribuan, pertanggungan mempunyai tujuan pertama-tama ialah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa
- 4) D.S. Hansell, menyatakan dengan tegas bahwa asuransi selalu berhubungan dengan risiko (*Insurance is to do with risk*).

Berdasarkan rumusan-rumusan pengertian tentang asuransi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu persetujuan timbak balik yang bersyarat, yaitu baik penanggung maupun tertanggung sama-sama memiliki hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Tertanggung mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi jika risiko yang diasuransikan terjadi dan juga mempunyai kewajiban untuk membayar premi. Dipihak

lain penanggung juga memiliki hak untuk menuntut pembayaran premi dari tertanggung, akan tetapi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas risiko yang diasuransikan tertanggung.

b. Tujuan Asuransi

Setiap kegiatan usaha tentu mempunyai tujuan, begitu pula dengan kegiatan asuransi. Adapun tujuan dari asuransi antara lain:

1) Pengalihan risiko

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.

2) Pembayaran ganti rugi

Tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

3) Pembayaran santunan

Dalam undang-undang diatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, yaitu asuransi sosial yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh, dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi) dan tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya serta mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

4) Kesejahteraan anggota

Merupakan asuransi saling menanggung atau asuransi bersama yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota. Disini beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung dan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.

c. Jenis-Jenis Asuransi

Perkembangan di dunia asuransi telah melahirkan bermacam-macam jenis asuransi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya. Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia jika dilihat dari Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian maka perusahaan asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

1) Perusahaan Asuransi Kerugian

Perusahaan asuransi jenis ini memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa tidak pasti.

2) Perusahaan Asuransi Jiwa

Perusahaan asuransi jenis ini hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi dalam bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

3) Perusahaan Reasuransi

Perusahaan asuransi ini hanya dapat menyelenggarakan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

d. Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdata berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Adapun syarat-syarat sah suatu perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Menurut ketentuan pasal tersebut ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian yaitu: kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, obyek tertentu, kausa yang halal. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD.

Menurut Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Adanya polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan bahwa perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut (Sri Rejeki Hartono, 2001: 84) :

- 1) Perjanjian asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian. Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita;
- 2) Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan jika peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi;
- 3) Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung diikuti kewajiban tertanggung membayar premi;
- 4) Kerugian yang diderita adalah akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan.

e. Syarat Perjanjian Asuransi

Secara umum sahnya suatu perjanjian diatur dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPdata serta pasal-pasal yang melindungi pasal tersebut, ialah Pasal 1321-1329 KUHPdata (Sri Rejeki Hartono, 2001: 97). Keempat hal yang tersebut dalam Pasal 1320 KUHPdata tidak boleh dilakukan karena adanya kekhilafan, paksaan, ataupun karena tipuan, sedangkan untuk syarat khusus diatur dalam KUHD, yaitu tentang kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD.

f. Asas-Asas Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi sebagai suatu perjanjian khusus mempunyai asas-asas tertentu yang menunjukkan karakteristik dari perjanjian asuransi. Adapun asas-asas tersebut yaitu:

1) Asas Indemnitas

Asas Indemnitas adalah suatu asas pertama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian itu sendiri (khusus untuk asuransi jiwa). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik yaitu untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung dimana hanya terbatas sampai pada keadaan atau posisi awal, artinya hanya mengembalikan pada posisi awal.

2) Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan.

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

3) Asas Kejujuran yang Sempurna

Masing-masing pihak dalam suatu perjanjian asuransi yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya, yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik itu diminta ataupun tidak.

4) Asas Subrogasi bagi Penanggung

Subrogasi adalah penyerahan hak menuntut dari tertanggung kepada penanggung mana kala jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung (Purwosutjipto, 1996: 93). Di dalam KUHD, asas ini secara tegas diatur dalam Pasal 284 yaitu :

“seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

5. Tinjauan Mengenai Asuransi Kredit

a. Pengertian Asuransi Kredit

Tahun 1971, tepatnya tanggal 6 april 1971 pemerintah telah mendirikan PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askindo) yang bertugas membantu pengamanan pinjaman yang diberikan oleh bank kepada para peminjam, khususnya kepada kalangan pengusaha kecil. Pengamanan tersebut dilakukan dengan menjamin pinjaman melalui penutupan asuransi, sehingga apabila pinjaman tidak dapat dikembalikan kepada bank, PT. Askindo akan menanggung sebagian dari jumlah pinjaman (Muhammad Djumhana, 2000: 260).

Asuransi kredit merupakan proteksi yang diberikan Asuransi (selaku penanggung) kepada bank (selaku tertanggung) atas risiko kegagalan debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (*cash loan*) seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan dan lain-lain yang diberikan oleh bank (<http://www.asei.co.id/produk/ask/Z>). Asuransi kredit kumpulan adalah asuransi kumpulan untuk para debitur dari suatu lembaga keuangan/ kreditur (<http://www.bumiputera.com/content.php?id=106>).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi kredit merupakan perlindungan yang diberikan perusahaan asuransi (selaku penanggung) kepada bank (selaku tertanggung) terhadap suatu risiko yaitu risiko kredit macet yang ada di bank sebagai obyek yang dipertanggungkan, yang diikuti dengan perjanjian asuransi kredit antara pihak asuransi dengan bank.

b. Tujuan Asuransi Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya mengandung risiko yaitu risiko akan terjadinya kredit macet. Kredit macet yang dialami bank sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan bank, karena debitur disini tidak hanya satu melainkan banyak. Walaupun bank sudah mengeluarkan syarat-syarat dan analisa kredit yang ketat, risiko terjadinya

kredit macet mungkin akan terjadi. Bila risiko itu terjadi maka bank akan mengalami kerugian.

Menurut Sri Rejeki Hartono mengemukakan bahwa adanya asuransi kredit, ialah guna dan untuk melindungi kepentingan bank dari kemungkinan tidak kembalinya kredit-kredit yang sudah dikeluarkan olehnya, atau atas semua risiko yang mungkin timbul karena pelaksanaan pemberian kredit kepada pihak lain (Sri Rejeki Hartono, 1985: 142).

c. Asuransi Jiwa Kredit

Asuransi jiwa kredit adalah asuransi jiwa yang memberi santunan sebesar sisa utang yang belum dilunasi sesuai dengan jadwal pelunasan, jika badan tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan (Purwosutjipto, 1996: 215). Asuransi jiwa kredit juga dapat diartikan sebagai suatu sistim proteksi yang dapat menjamin masa depan kreditur jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang (http://www.car.co.id/produk/korp_askredit.asp).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa kredit merupakan salah satu cara yang digunakan pihak bank untuk melindungi kredit yang telah diberikan kepada debiturnya, karena jika debitur meninggal dunia dan kreditnya belum lunas maka kredit yang masih berjalan tersebut pelunasannya diambil alih oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagai uang santunan yang hanya dipergunakan untuk melunasi kredit yang diterima debitur yang meninggal dunia tersebut sehingga pihak bank tidak akan dirugikan dan untuk para ahli warisnya tidak akan dikenakan kewajiban untuk mengembalikan kredit tersebut.

Asuransi jiwa kredit ini juga lazim digunakan oleh pihak perbankan dalam rangka pengamanan kredit yang dikeluarkannya. Adapun keuntungan yang timbul dari asuransi jenis ini adalah (Purwosutjipto, 1996: 215):

- 1) Menjamin ahli waris peminjam atau orang yang ditunjuk, jika peminjam meninggal sebelum lunas utangnya, agar barang yang

dibeli dengan cara utang tersebut tetap menjadi miliknya tanpa menanggung sisa utangnya.

- 2) Menjamin pemberi pinjaman, jika peminjam meninggal sebelum selesai melunasi utangnya, maka sisa utang yang masih belum dibayar, akan dibayar sekaligus oleh penanggung (asuransi).

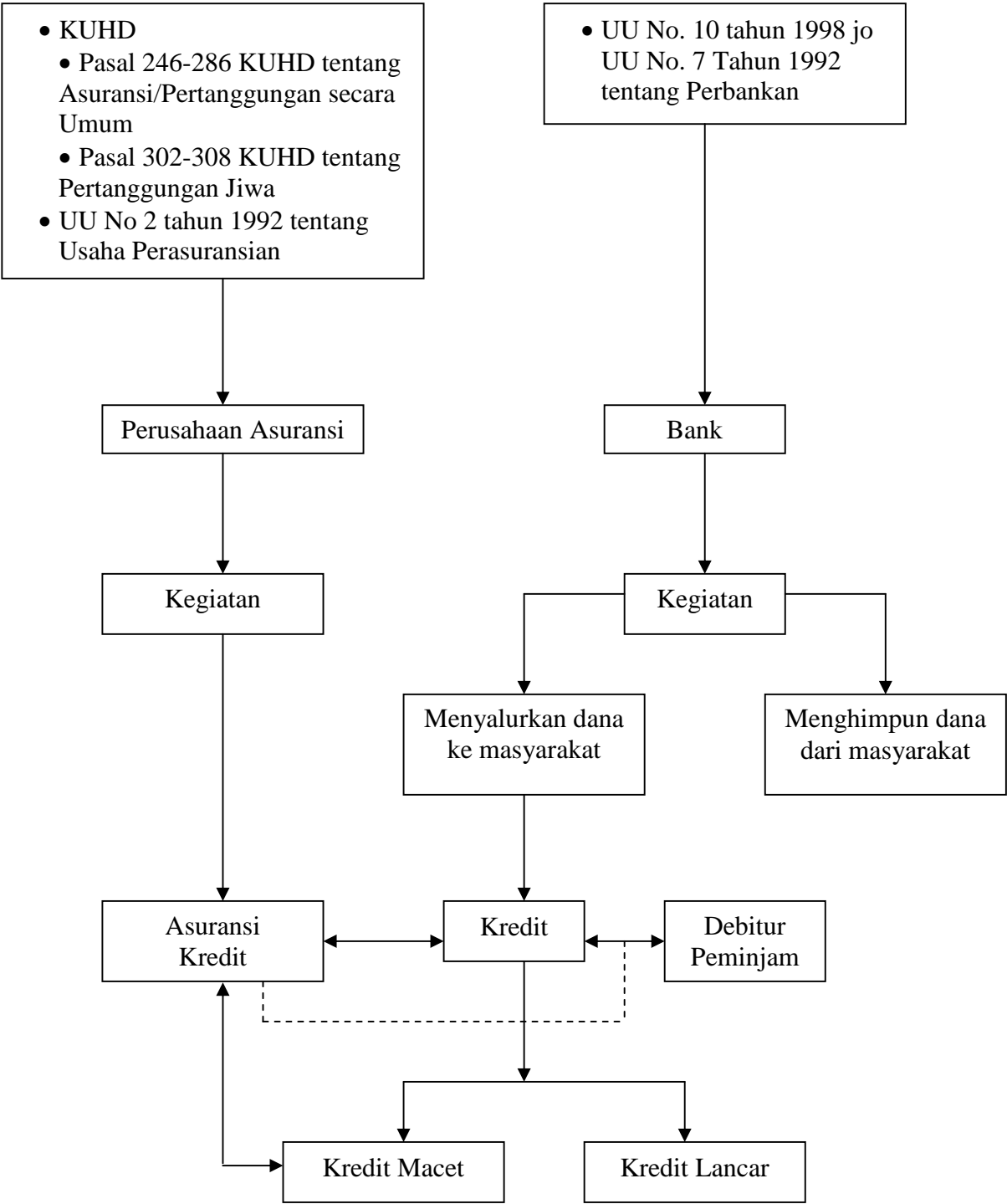
d. Asuransi untuk Kepentingan Pihak Ketiga

Asuransi atau pertanggungan dapat ditutup untuk kepentingan pihak ketiga, baik atas dasar kuasa umum atau khusus, maupun di luar pengetahuan yang berkepentingan. Pemberian kuasa itu dapat berdasar hubungan “pemberian kuasa” atau hubungan “penyelenggaraan urusan”. Asuransi untuk kepentingan pihak ketiga atas dasar pemberian kuasa atau hubungan “penyelenggaraan urusan” mempunyai arti asuransi itu dibuat untuk kepentingan pihak ketiga yang memberi kuasa atau yang diwakili. Tetapi asuransi di luar pengetahuan yang berkepentingan ini agak aneh, sebab asuransi ini akan batal karena hukum, bila benda pertanggungan yang sama itu oleh yang berkepentingan sendiri atau oleh orang yang dikuasakan untuk itu telah diasuransikan sebelum pihak ketiga yang berkepentingan itu tahu bahwa benda miliknya telah diasuransikan oleh orang lain (Pasal 266 KUHD).

Asuransi untuk kepentingan pihak ketiga dalam polis harus ditegaskan apakah asuransi itu berdasarkan atas pemberian kuasa atau di luar pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 265 KUHD), dan apabila dalam polis tidak ditegaskan bahwa asuransi itu dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, maka harus dianggap bahwa asuransi itu dibuat untuk diri sendiri (Pasal 267 KUHD). Menurut Pasal 264 KUHD ada dua bentuk asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, yaitu:

- 1) Berdasarkan kuasa dari orang yang berkepentingan;
- 2) Tanpa kuasa dari orang yang berkepentingan

B. Kerangka Pemikiran



Bagan 2

Penjelasan :

Pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945, tidak akan terlepas dari peran serta lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan. Bank membantu program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara memberikan kredit yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha masyarakat.

Adanya asas kehati-hatian, membuat pihak bank memberikan kredit dengan syarat adanya suatu jaminan kredit yang sesuai dengan kredit yang diajukan calon debitur, dengan kata lain bahwa dalam pemberian kredit harus ada jaminan atau agunannya. Hal ini menjadi syarat pemberian kredit karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, dan untuk mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit maka diperlukan jaminan pemberian kredit, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor adanya jaminan inilah yang penting dan harus diperhatikan oleh bank, sebab pemberian jaminan tersebut berfungsi memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan atas hutang bila debitur cidera janji tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Persoalan dalam kredit muncul, ketika para pengusaha yang memerlukan modal usaha untuk mengembangkan usahanya mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam pembayaran angsuran kreditnya terhadap pihak bank, sebagaimana jangka waktu pengembalian kredit yang telah diperjanjikan antara debitur dengan bank. Dalam hal pengusaha atau debitur mengalami tunggakan dalam pelunasan kredit maka akan terjadi risiko yang tidak diharapkan oleh pihak bank, yaitu terjadinya kredit macet. Kredit macet yang terjadi pada suatu bank akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank, karena uang yang disalurkan kepada masyarakat melalui kredit terlambat

kembalinya sehingga bank akan kesulitan untuk melakukan kegiatan usahanya.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan, peranan lembaga asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non perbankan untuk mengalihkan risiko dan memberikan ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang tidak tentu menjadi sangat penting dalam kehidupan dan pembangunan ekonomi. Asuransi mempunyai arti penting bagi bank untuk mengatasi risiko kredit macet yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kredit. Dalam hal ini bank dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk mengamankan kredit yang diberikan oleh bank melalui jasa asuransi kredit. Dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi dan bank melakukan suatu perjanjian timbal balik, di satu sisi perusahaan asuransi berusaha menanggung kerugian dan di sisi lain bank harus membayar premi sesuai yang diperjanjikan. Adanya asuransi kredit tersebut berguna untuk melindungi kepentingan bank dari kemungkinan tidak kembalinya kredit-kredit yang sudah dikeluarkan, atau atas semua risiko yang mungkin timbul karena pelaksanaan pemberian kredit kepada pihak lain.

Adanya perlindungan atas pemberian kredit oleh pihak asuransi dapat mengurangi rasa khawatir pihak bank atas terjadinya risiko tidak dikembalikannya kredit sehingga bank tidak lagi enggan untuk memberikan kreditnya kepada pengusaha-pengusaha yang membutuhkan dana, karena risiko yang mungkin timbul telah dialihkan pada perusahaan asuransi. Namun demikian, calon peminjam tetap harus melalui tahapan-tahapan atau proses peminjaman yang telah ditetapkan oleh bank sebagaimana proses pemberian kredit yang lazim dilakukan bank. Debitur dan bank melakukan perjanjian kredit dan debitur merupakan pihak ketiga yang diasuransikan kepentingannya di dalam asuransi kredit.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Perusda BPR Bank Pasar Klaten

Perusda BPR Bank Pasar Klaten dipimpin oleh seorang direktur utama yang saat ini dipimpin oleh Ir. Untung Sriyanto. Sejarah Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Klaten tidak dapat dipisahkan dari sejarah hari jadi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1948 jo Undang-Undang No 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950. Pemilihan anggota DPRDS Kabupaten Klaten dilakukan tanggal 28 September 1950, sedang pelantikan anggota DPRDS tersebut dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1950. Pelantikan anggota DPRDS tersebut resmiah berdirinya Pemerintah Daerah Otonom dengan aparat pemerintah bidang legislatif DPRDS pada saat itu menggantikan Badan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah Kabupaten Klaten setelah resmi berdiri, maka pada tanggal 1 Agustus 1951 dibuatlah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pendirian Bank Pasar yaitu Perda No. 12/DPRD/'51 tanggal 1 Agustus 1951. Sebagai pelaksana dari pada Peraturan Daerah tersebut oleh Dewan Pemerintahan Daerah Sementara Kabupaten Klaten dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusda BPR Bank Pasar Klaten yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Tanggal 22 November 1951 No.5/SK/'51. Asas dan tujuan Perusda BPR Bank Pasar Klaten pada waktu itu sebagai berikut :

- a. Bank Pasar diselenggarakan untuk membuka jalan agar pedagang dalam masyarakat kalangan pedagang merasa sebagai anggota keluarga sendiri, yang bersama usaha menyusun perekonomian akan mempertinggi martabatnya yang berdasarkan asas gotong royong.
- b. Membimbing kepada para penjual di Pasar (pedagang kecil) agar dapat menghimpun modal secara menabung.

- c. Memberikan pinjaman modal untuk menolong kepada para penjual di pasar (pedagang kecil) agar mereka dapat memperbesar mata penceharian dan jangan sampai jatuh ditangan pelepas uang.

Pada tanggal 1 Mei 1964 oleh Pemerintah Daerah didirikan Bank Kesejahteraan Buruh dengan usaha memberi kredit kepada para karyawan di lingkungan Pemerintah Daerah, akan tetapi bank ini berhenti aktifitasnya. Pada tahun 1930 atas dasar *Ryksblad* tahun 1930 No.4 lahirlah Bank Desa yang kepengurusannya langsung ditangani Pemerintah Kasunanan Surakarta dengan *Ryksblad* tahun 1939 No.8, akan tetapi bank ini terhenti aktifitasnya karena adanya Undang-Undang No. 16 tahun 1947 tentang Pembekuan Kekuasaan Pemerintah Swapraja/ Kasunanan Surakarta. Seiring dengan berjalannya waktu kemudian ditetapkanlah Surat Keputusan DPRD Kabupaten Klaten tanggal 8 Juni 1967 No.7/SK/DPRD/1967 tentang Penunjukan Bank Pasar, Bank Kesejahteraan Buruh, dan Badan Kredit Desa menjadi Perusahaan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan nama Bank Daerah. Bank Daerah memperoleh *press release* Bank Indonesia tanggal 31 agustus 1970 cq Surat Menteri Keuangan tanggal 6 Agustus 1970 No.B.331/MK/IV/8/1970 maka Perusahaan Daerah Bank Kabupaten Klaten masih diperbolehkan melakukan usaha sambil mengajukan izin kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten No.2 tahun 1980 ditetapkanlah Anggaran Dasar Perusahaan Bank Daerah Kabupaten Dati II Klaten dan nama Perusahaan Bank Daerah Kabupaten Dati II Klaten diubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Dati II Klaten, serta mencabut Surat Keputusan DPRD tanggal 8 Juni 1967 No.7/SK/DPRD/67. Setelah anggaran dasar terbentuk kemudian mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 September 1980 No. KEP.036/KM.11/1980 yang berisi sebagai berikut : “Memberi ijin kepada PD. BANK PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLATEN NPWP 729.107 H alamat Jl.Pemuda Utara No.1 (sekarang Jalan Veteran no 140) Klaten Jawa Tengah untuk melakukan usaha bank pasar”. Anggaran Dasar diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.8

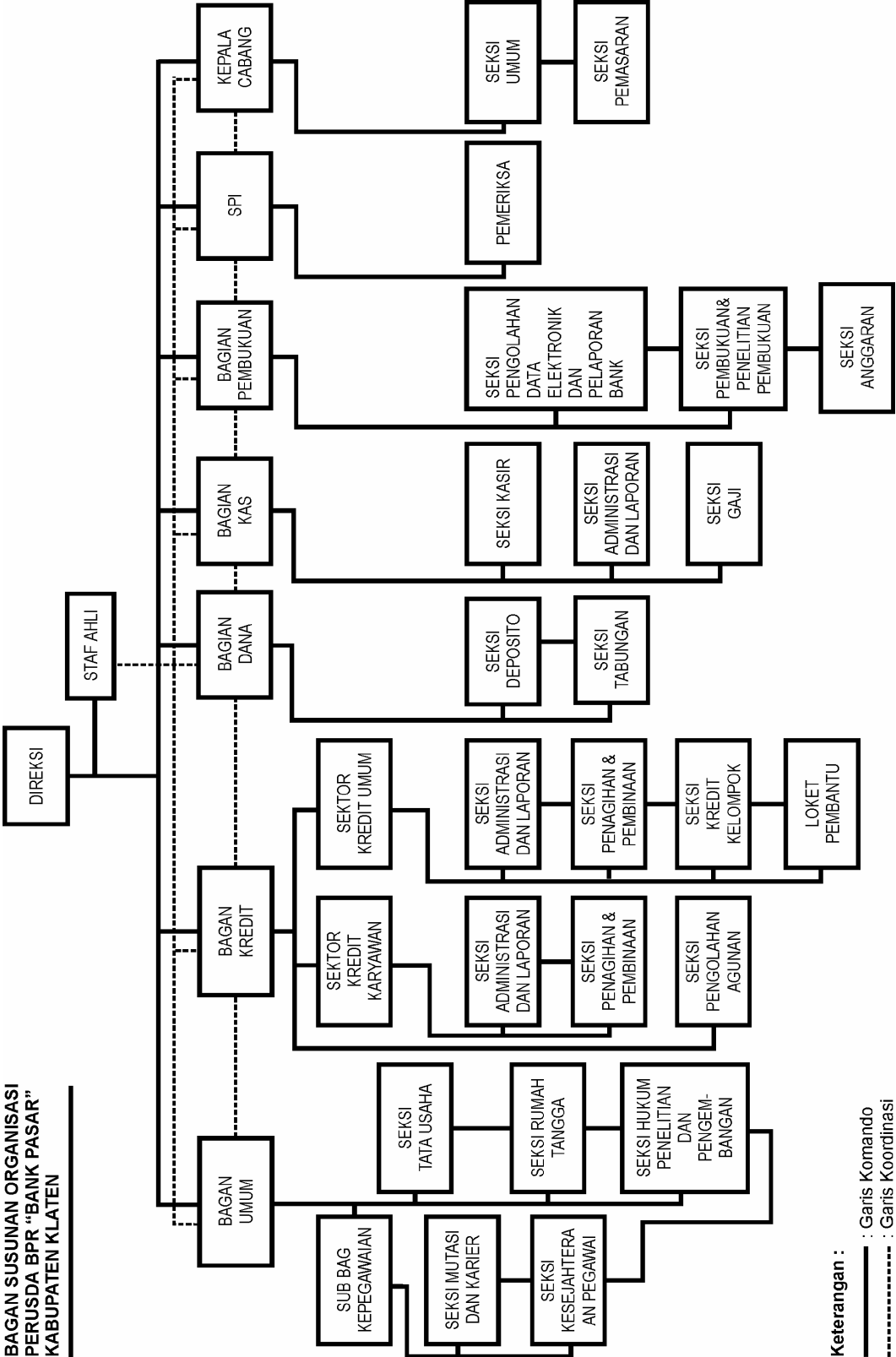
Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Klaten, disahkan oleh Gubernur KDH Jawa Tengah No.188/05/1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah pada Tanggal 21 Februari 1995 pembukaan seri D No.2. Perubahan nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten memperoleh izin persetujuan Menteri Keuangan RI dengan SK No KEP-462/KM/1997 tanggal 1 Agustus 1997. Sampai sekarang bernama Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Klaten dengan Dasar Hukum yaitu :

- a. Undang-Undang No.10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 No 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3790) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 30 tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32 / 35 / KEP /DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 34 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.8 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Klaten.

2. Struktur Organisasi Perusda BPR Bank Pasar Klaten

Struktur Organisasi Perusda (Perusahaan Daerah) BPR Bank Pasar Klaten didasarkan pada Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten No.PD BPR BP/SK/Dir/32/XII/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten. Struktur Organisasi BPR Bank Pasar Klaten berisikan tugas dan wewenang masing-masing jabatan,

dari jabatan yang terendah seperti petugas kebersihan (*cleaning service*) sampai dengan Kepala Bagian, sedangkan Direksi (Direktur Utama dan Direktur) dan Dewan Pengawas diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 34 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten. Adapun bagan stuktur organisasi di Perusda BPR Bank Pasar Klaten secara lengkap dapat dilihat dibawah ini:



Bagan 3

3. Kegiatan Usaha Perusda BPR Bank Pasar Klaten

Lingkup usaha Perusda (Perusahaan Daerah) Bank Pasar Klaten di atur di dalam BAB IV Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 34 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten, bahwa Bank Pasar merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan atau perbankan yang menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 menjelaskan bahwa Bank Pasar menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Saat ini produk tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat antara lain: Tabungan SI MANIS (Tabungan Masyarakat Insan Sejahtera), Tabungan TARA (Tabungan Manunggal Abadi kerjasama BPR se-Jateng dan DIY), Tabungan Desa (Tabungan hasil pelepasan tanah dan pengembalian PBB), Tabungan Karyawan (Tabungan dari potongan gaji dan potongan arisan wajib, Tabungan Labbaik (Tabungan Lembaga Amal Bakti), Tabungan insentif (Tabungan milik dinas). Deposito berjangka saat ini menggunakan ketentuan jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan.
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah.
- c. Melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten di dalam Bab III Pasal 3 disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Klaten memberikan pelayanan kredit berupa :

- a. Kredit Karyawan untuk: Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Perusahaan Daerah, anggota TNI dan Polri, pensiunan serta karyawan swasta, yang

selanjutnya disebut Sektor Kredit Karyawan. Ketentuan pinjaman di atur di dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten dalam Pasal 5, ada beberapa hal yang diperbarui dengan Selebaran Direksi untuk Sektor Kredit Karyawan yaitu :

Besarnya Kredit Minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bunga kredit ditentukan tersendiri oleh direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas. Saat ini besar bunga dalam sektor kredit karyawan adalah 1% (satu persen) dihitung tetap (flat) per bulan khusus untuk pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, untuk pegawai negeri di luar lingkungan Kabupaten Klaten saat ini besar bunga adalah 1,25 % (satu koma dua lima persen) dihitung tetap (flat) per bulan.

Besarnya Provisi adalah 2,00 % (dua persen), biaya administrasi 0,50% (nol koma lima puluh persen), besarnya materai disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sistem Angsuran Setiap bulan potong gaji, jangka waktu pinjaman maksimal 60 bulan, di dalam selebaran yang baru ditentukan bahwa jangka waktu pinjaman untuk karyawan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten bisa sampai 100 bulan dan plafond (kredit yang diberikan) bisa sampai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan catatan harus dilihat jumlah gaji yang diterima PNS tersebut tiap bulan. *Borg* atau Jaminan sektor kredit karyawan dalam selebaran yang baru ditetapkan sebagai berikut : Karpeg (Kartu Pegawai), SK Capeg (Surat Keputusan Calon Pegawai), SK Angkatan, Taspen, SK terakhir, SK Kenaikan Pangkat, SK Berkala, BPKB, Sertipikat dan photo kopi NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atau SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Wewenang memutus kredit pada sektor kredit karyawan tahap akhir berada di tangan Direktur Utama atau Direktur (yang selanjutnya disebut dengan Direksi) yang sebelumnya melalui putusan komite yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari : Direktur Utama atau Direktur, Ka.Sub Bag.

Analisis Kredit, Ka. Bag. Kredit, Kepala Bagian Umum, SPI, dan Ka.Sub. Bag. Penagihan.

- b. Kredit Umum untuk : Pengusaha, pedagang, industri, pengrajin, dan petani. Hal ini untuk selanjutnya disebut Sektor Kredit Umum. Ketentuan pinjaman di atur di dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten dalam Pasal 6 yang ada beberapa hal yang diperbarui dengan Selebaran Direksi untuk Sektor Kredit Umum sebagai berikut :

Besarnya kredit minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bunga kredit ditentukan tersendiri oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas. Saat ini bunga kredit ditetapkan 2,5 % (dua koma lima persen) menurun per bulan. Besarnya provisi 2,00 % (dua persen). Biaya administrasi 0,50 % (nol koma lima puluh persen). Biaya materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem angsurannya dilakukan setiap bulan atau musiman. Jangka waktu pinjaman untuk pinjaman pertama kali bisa mencapai 2 tahun. *Borg* atau jaminan yang digunakan dalam sektor kredit umum adalah Sertipikat tanah atau BPKB. Wewenang memutus kredit dalam sektor kredit umum pada tahap akhir berada di tangan Direktur Utama atau Direktur (yang selanjutnya disebut dengan Direksi) yang sebelumnya melalui putusan komite yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari : Direktur Utama atau Direktur, Ka. Sub Bag. Analisis Kredit, Ka. Bag. Kredit, Ka. Bag. Umum, SPI, dan Ka. Sub. Bag. Penagihan.

4. Prosedur Pemberian Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten

Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten merupakan Perusahaan Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memegang peranan penting dalam usaha untuk mensejahterakan rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Klaten dan sekitarnya pada khususnya. Guna memperoleh kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten

maka calon debitur atau nasabah harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku, adapun ketentuan dan syarat-syarat untuk memperoleh kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten diatur di dalam Keputusan Direksi BPR Bank Pasar Klaten No PD.BPR BP/SK/Dir/49/VII/2005 tentang Prosedur Pemberian Kredit di Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Klaten, yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang terdiri dari :

- a. Sektor Kredit Karyawan, prosedur pemberian kreditnya diatur didalam Pasal 2. Posedur kreditnya antara lain :
 - 1) Mengadakan perjanjian kerjasama dengan Peruda BPR Bank Pasar Klaten yang ditandatangani Direksi dan Kepala atau Pimpinan beserta Bendaharawan pemotong gaji instansi yang bersangkutan.
 - 2) Calon nasabah diberikan blangko permohonan kredit untuk dimintakan tanda tangan Kepala atau Pimpinan beserta bendaharawan pemotong gaji.
 - 3) Calon nasabah mengembalikan blangko yang telah diisi secara lengkap dengan dilampiri surat-surat atau persyaratan lain yang telah ditentukan oleh Bank Pasar.
 - 4) Permohonan kredit yang telah diperiksa kelengkapan persyaratannya oleh Kepala Sub. Bagian Kredit Karyawan akan disampaikan kepada Analis Kredit untuk diadakan analisa kelayakannya.
 - 5) Analis kredit akan menyampaikan hasil analisisnya untuk dipertimbangkan kepada Kepala Bagian Kredit untuk selanjutnya dimintakan keputusan pemberian kredit oleh Direksi.
 - 6) Apabila calon nasabah telah menyetujui Keputusan Direksi tersebut selanjutnya akan dilakukan proses realisasi atau penyerahan kredit.
- b. Sektor Kredit Umum, prosedur pemberian kreditnya diatur didalam Pasal 3. Prosedur kreditnya antara lain:
 - 1) Semua nasabah akan diberikan blangko permohonan kredit untuk dimintakan blangko kepala desa dimana calon nasabah bertempat tinggal dan atau dimana lokasi *borg* yang dijaminkan.

- 2) Calon nasabah mengembalikan blangko yang telah diisi secara lengkap dengan dilampiri surat-surat atau persyaratan lain yang telah ditentukan oleh Bank Pasar.
- 3) Kepala Sub. Bagian Kredit Umum atau Kepala Kantor Kas akan melakukan kunjungan ke lokasi atau tempat nasabah maupun lokasi *borg* yang digunakan sebagai jaminan.
- 4) Selanjutnya kunjungan ke calon nasabah tersebut akan disampaikan kepada analisis kredit untuk diadakan analisa kelayakannya.
- 5) Analis kredit akan menyampaikan hasil analisisnya untuk dimintakan pertimbangan kepada Kepala Bagian Kredit untuk selanjutnya dimintakan keputusan pemberian kredit oleh Direksi.
- 6) Apabila calon nasabah telah menyetujui Keputusan Direksi tersebut selanjutnya akan dilakukan proses realisasi atau pencairan kredit.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub. Bagian Kredit Karyawan dan Kepala Sub. Bagian Kredit Umum pada tanggal 4 Januari 2008 pukul 10.00 wib bahwa

“Prosedur untuk memperoleh kredit didalam prakteknya telah sesuai dengan Keputusan Direksi BPR Bank Pasar Klaten No PD.BPR BP/SK/Dir/49/VII/2005 tentang Prosedur Pemberian Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten pada Pasal 2 dan Pasal 3. Hanya saja dalam praktek ada potongan premi untuk asuransi kredit yang dilakukan pada saat pertama kali debitur di bagian *customer service*, dan di *customer service* debitur diberitahu mengenai potongan premi untuk asuransi kredit dan ini sifatnya wajib. Jika debitur tidak mengikuti program asuransi kredit ini maka debitur tidak bisa memperoleh kredit dari Perusda BPR Bank Pasar Klaten”.

Asuransi kredit merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya risiko kredit macet yang merugikan atau mempengaruhi tingkat kesehatan bank, dalam hal ini adalah Perusda BPR Bank Pasar Klaten. Debitur yang ikut program asuransi kredit akan mendapatkan kwitansi pembayaran premi yang dikeluarkan oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten sebagai tanda bukti bahwa debitur tersebut ikut dalam program asuransi kredit yang ada di perusda BPR Bank Pasar Klaten dan juga merupakan bukti pembayaran premi, sedangkan

dalam perjanjian kredit klausula tentang asuransi kredit tidak diatur didalamnya.

Kredit yang akan diberikan oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten juga mempertimbangkan tentang adanya benda yang akan dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur. Adapun persyaratan benda jaminan atau *borg* yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang akan mengajukan kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten di bagi ke dalam 2 (dua) hal yaitu Sektor Kredit Umum dan Karyawan. Hal ini juga diatur di dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Klaten No PD. BPR BP/SK/Dir/49/VII/2005 tentang Prosedur Pemberian Kredit di Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Klaten Pasal 4 dan Pasal 5, yaitu sebagai berikut :

a. Sektor Kredit Karyawan (Pasal 4):

- 1) Untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) antara lain: Kartu Pegawai, Kartu Taspen, SK Calon Pegawai, SK Pegawai Negeri, Sertifikat tanah atau BPKB Kendaraan.
- 2) Untuk TNI/Polri antara lain: ASABRI, SKEP, SK Terakhir, Sertifikat Tanah, BPKB Kendaraan.
- 3) Untuk pensiunan PNS antara lain: SK Pensiun, KARIP, Seriftikat Tanah, BPKB Kendaraan.
- 4) Untuk pegawai swasta antara lain: Kartu Asuransi Tenaga Kerja, Kartu Jamsostek, SK Pengangkatan Pegawai, Sertifikat Tanah atau BPKB.

b. Sektor Kredit Umum (Pasal 5):

- 1) Sertifikat tanah
- 2) Sertifikat deposito atau tabungan dari Bank Pasar
- 3) BPKB Kendaraan
- 4) Jaminan Tunjuk

5. Pengawasan Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten

Pengawasan kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten dilakukan oleh Sub. Bag. Penagihan dan Pembinaan yang tugasnya melakukan pembinaan

dan penagihan terhadap debitur yang kreditnya kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun penggolongan kualitas suatu kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten yaitu dengan berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat di dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa kualitas kredit dengan masa angsuran 1(satu) bulan atau lebih ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, apabila :
 - 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga; atau
 - 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan kredit belum jatuh tempo.
- b. Kurang Lancar, apabila :
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran; dan/atau
 - 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
- c. Diragukan, apabila :
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; dan/atau
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
- d. Macet, apabila :
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran.
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan.
 - 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau
 - 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Bank dikatakan sehat jika NPL (*Non Performing Loans*) atau kriteria pinjaman kredit itu maksimal 5% (lima persen), sebagai contoh jika jumlah

total plafond kredit sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), NPLnya 5% dari Rp.100.000.000,00 adalah Rp 20.000.000,00, jika tunggakan lebih dari Rp 20.000.000,00 maka bank dikatakan tidak sehat. Berdasarkan data yang diambil oleh peneliti di bawah ini, disampaikan tentang kondisi kesehatan angsuran dari instansi-instansi atau dinas yang berada di jajaran Sekda Klaten yang melakukan perjanjian kredit dengan Perusda BPR Bank Pasar Klaten bulan Februari tahun 2008 , yaitu :

NO	INSTANSI/ DINAS	JUMLAH DEBITUR	NPL (<i>Non Performing Loans</i>)
1	Pemda Klaten	168 Orang	0%
2	DPRD Klaten	26 Orang	4,88%
3	Kantor Pos	12 Orang	47,32%
4	BPD	26 Orang	0%
5	SD (Sekolah Dasar)	96 Orang	0%
6	Depdiknas Klaten	93 Orang	0,48%
7	Depag Klaten	25 Orang	0%
8	Pengadilan Agama Klaten	7 Orang	0%
9	RSUP klaten	33 Orang	0,21%
10	Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Klaten	20 Orang	11,42%
11	SMP dan SMA Klaten	215 Orang	2,68%
12	ABRI	14 Orang	69,08%

Sumber data : Sub Bagian Kredit Karyawan, Februari 2008

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah debitur yang terbanyak bulan Februari 2008 adalah PNS yang berasal dari instansi SMP dan SMA Kabupaten Klaten, sedangkan yang paling sedikit dalam bulan Februari adalah Pengadilan Agama Kabupaten Klaten. Ada beberapa instansi atau dinas yang kreditnya tidak sehat (di atas 5%), yaitu Kantor Pos,

Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Klaten, serta ABRI (menduduki tingkat NPL paling tinggi). Tingginya NPL di instansi-instansi tersebut terjadi karena beberapa sebab, antara lain: debitur dipindah tugaskan dan tidak ada pemberitahuan tentang pemindahan tersebut, debitur dipecat atau pensiun dini, adanya penyelewengan dari bendaharawan instansi tempat debitur bekerja yang ditunjuk oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten untuk melakukan pemotongan gaji dari debitur tersebut, adanya permainan atau pemalsuan gaji yang dilakukan debitur. Sebab-sebab tersebut akan menimbulkan kredit bermasalah dan akhirnya akan berpengaruh terhadap besarnya NPL di Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

Pengawasan dan penyelamatan kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten dilakukan dengan cara pasif dan aktif, pengawasan kredit bertujuan untuk mengendalikan NPL (*Non Performing Loans*) bank. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan melihat angsuran yang dilakukan oleh debitur, jika angsurannya tidak menunggak maka kredit digolongkan sebagai kredit lancar. Sedangkan jika angsurannya mengalami tunggakan atau terlambat maka kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah. Untuk kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah, maka perlu dilakukan tindakan penyelamatan kredit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka. Bag. Kredit Bapak Edy Priyanto, B.sc pada tanggal 4 Januari 2008 pukul 11.30 wib bahwa upaya-upaya awal yang dilakukan oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam menyelesaikan kredit bermasalah yaitu dengan cara:

- a. Dibuatkan surat pemberitahuan angsuran pinjaman (lihat lampiran VII), dalam surat angsuran pinjaman berisi mengenai jumlah angsuran pokok, bunga, dan denda.
- b. Apabila setelah dikirimkan surat pemberitahuan angsuran pinjaman debitur tetap belum melakukan pembayaran, maka tahap selanjutnya adalah dibuatkan surat panggilan (lihat lampiran VIII). Surat panggilan berisi perintah yang ditujukan kepada debitur untuk datang ke Perusda BPR Bank Pasar Klaten guna menyelesaikan tunggakan dalam pengembalian kredit yang terjadi terhadap debitur tersebut. Di dalam surat panggilan juga dicantumkan kembali mengenai jumlah angsuran pokok,

bunga, dan denda seperti di dalam surat pemberitahuan angsuran pinjaman.

- c. Apabila debitur masih tidak memenuhi panggilan maka tahap selanjutnya dibuatkan surat penyelesaian kredit (lihat lampiran IX) yang pada intinya berisi penegasan kembali terhadap surat panggilan sampai batas waktu yang ditentukan dalam surat penyelesaian kredit. Hal ini biasanya untuk sektor kredit umum.
- d. Apabila debitur juga belum memenuhi apa yang diharapkan dari surat tersebut di atas maka tahap selanjutnya yaitu dibuatkan surat peringatan I,II,dan surat peringatan terakhir (lihat lampiran X,XI,dan XII). Dalam surat peringatan juga dicantumkan angsuran pokok yang belum dibayarkan, bunga, dan denda. Dalam surat peringatan terakhir ada tambahan isi yaitu jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam surat peringatan terakhir maka penagihan selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri Klaten atau KP2LN Cabang Surakarta yang sekarang bernama KPKLN (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Setiap pemberian surat-surat diatas selalu diikuti dengan pembinaan dan pendekatan personal terhadap debitur yang kreditnya bermasalah, yaitu pendekatan secara kekeluargaan yang dilakukan oleh pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten. Bank akan meneliti sebab-sebab yang menyebabkan kredit debitur bermasalah dan memberikan saran-saran terhadap kendala-kendala yang dihadapi debitur dalam menjalankan usahanya.

B. Asuransi Kredit sebagai Salah Satu Alternatif bagi Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam Mengatasi Resiko Kredit Macet.

1. Hasil Penelitian.

Perusda BPR Bank Pasar Klaten merupakan bank milik pemerintah daerah klaten yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat. Salah satu tujuan pendirian Perusda BPR Bank Pasar Klaten adalah untuk memberikan pinjaman modal dan memberikan pertolongan kepada para pengusaha atau pedagang kecil agar mereka dapat memperbesar mata pencaharian dan jangan

sampai jatuh di tangan pelepas uang. Salah satunya dengan cara pemberian kredit kepada masyarakat, baik itu melalui sektor kredit umum maupun sektor kredit karyawan.

Ketentuan mengenai asuransi kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten diatur di dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Klaten No PD.BPR BP/SK/Dir/49/VII/2005 tentang Prosedur Pemberian Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten pada Pasal 9 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap nasabah kredit karyawan, kredit umum, dan kantor kas harian dapat diikutkan asuransi kredit, sedangkan mengenai perusahaan asuransi yang diajak kerjasama diatur dalam Pasal 9 ayat 2 yang pada intinya bahwa perusahaan asuransi yang diajak kerjasama ditunjuk oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten. Besarnya biaya asuransi ditentukan sesuai dengan ketentuan lembaga asuransi, ketentuan ini diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Klaten No PD.BPR BP/SK/Dir/49/VII/2005 tentang Prosedur Pemberian Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam Pasal 9 ayat 3.

Perusda BPR Bank Pasar Klaten melakukan perjanjian asuransi dengan Perusahaan Asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta, Perusahaan Asuransi Sarana Lindung Semarang, dan Perusahaan Asuransi Jasa Raharja sebagai perusahaan asuransi yang diajak kerjasama. Data yang diambil di lapangan contoh perusahaan asuransinya adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta, dimana Perusda BPR Bank Pasar Klaten sebagai pihak bertanggung dan AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta adalah sebagai pihak penanggung. Asuransi yang dimaksud adalah asuransi jiwa kredit yang bertujuan untuk mengalihkan risiko dari bertanggung kepada penanggung bila terjadi *evenement* (sesuatu yang belum pasti terjadinya) sesuai dengan yang diperjanjikan. Kerjasama ini merupakan salah satu upaya dari Perusda BPR Bank Pasar Klaten untuk mengatasi risiko kredit macet. Perjanjian asuransi tersebut dilakukan antara Direktur Perusda BPR Bank Pasar Klaten sebagai pihak bertanggung dan Direksi AJB

Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta sebagai pihak penanggung. Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk polis yang berlakunya sampai kepesertaan terakhir yang tercantum dalam daftar peserta dan polis ini tetap berlaku walaupun terjadi pergantian kepengurusan di masing-masing instansi sampai adanya kebijakan baru dari kedua belah pihak tentang berlakunya polis tersebut. Perjanjian asuransi (polis) tersebut terpisah dengan perjanjian kredit.

Perjanjian asuransi (polis) menyebutkan bahwa jenis asuransi jiwa kredit yang harus dilakukan oleh Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta terhadap Perusda BPR Bank Pasar Klaten adalah Asuransi Jiwa Kredit Cicilan Bulanan yaitu jenis asuransi yang memberikan proteksi kepada debitur sebesar uang pertanggungan sesuai yang tercantum dalam daftar peserta. Jangka waktu asuransi kredit adalah sama dengan masa pengembalian kredit debitur. Asuransi jiwa kredit ini akan berakhir dengan sendirinya setelah debitur melunasi pinjaman atau terhitung sejak saat pelunasan tersebut. AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta akan melunasi sisa pinjaman (*outstanding*) dari nasabah atau debitur yang meninggal dunia.

Perjanjian asuransi yang dibuat antara Perusda BPR Bank Pasar Klaten dengan AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta tidak terlepas dari ketentuan tentang pembayaran premi. Pasal 246 KUHD disimpulkan bahwa tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada penanggung sebagai kontraprestasi dari ganti kerugian yang akan diberikan oleh penanggung. Dalam pelaksanaannya besarnya premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung untuk setiap kredit yang diasuransikan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Premi} = \frac{\text{Plafond Kredit} \times \text{Tabel Asuransi}}{1000}$$

Tabel Asuransi yang dimaksud adalah tabel yang menunjukkan besarnya nilai asuransi yang harus dibayar. Tabel asuransi yang dimaksud dapat dilihat dibawah ini:

Untuk uang pertanggungan sampai dengan Rp.15.000.000,00

UMUR	MASA ASURANSI									
	10	12	20	24	30	36	40	48	50	60
	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
18-55	2,050	2,050	3,578	3,960	5,028	5,740	6,420	7,440	7,764	9,060

Untuk uang pertanggungan Rp.15.000.000,00-Rp.200.000.000,00

UMUR	MASA ASURANSI									
	10	12	20	24	30	36	40	48	50	60
	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
18-55	2,880	2,880	5,096	5,650	7,246	8,310	9,330	10,860	11,348	13,300

Tabel di atas menunjukkan besarnya nilai untuk menentukan premi yang harus dibayarkan debitur yang ditentukan sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang berdasarkan: usia debitur, jumlah plafon kredit, dan jangka waktu pelunasan kredit. Premi yang harus dibayarkan oleh seorang debitur berumur 38 tahun, yang mengambil kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten sebesar Rp.10.000.000,00 dengan jangka waktu 40 bulan adalah sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Premi} &= \frac{\text{Plafond Kredit}}{1000} \times \text{Tabel Asuransi} \\ &= \frac{\text{Rp.10.000.000,00}}{1000} \times 6,420 = \text{Rp.64.200,00} \end{aligned}$$

Debitur di atas, apabila meninggal dunia sebelum kreditnya lunas dan ternyata meninggalkan sisa kredit sebesar Rp.5.000.000.00, maka pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten akan mengajukan klaim ke AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta dan sisa kredit debitur tersebut akan dilunasi oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta, yaitu sebesar Rp.5.000.000,00.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka. Sub Bag. Kredit Umum Ibu Ninik pada tanggal 4 januari 2008 pukul 10.30 wib bahwa teknis pelaksanaan perjanjian asuransi yaitu:

“bahwa untuk menghimpun premi dari peserta asuransi, maka AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta membuka rekening tabungan pada Perusda BPR Bank Pasar Klaten yang selanjutnya data peserta atau debitur yang ikut asuransi kredit akan diambil pada tiap awal bulan.

Premi asuransi dari debitur dipotong langsung oleh bank pada saat pencairan kredit dan langsung dimasukkan ke dalam rekening AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta atau paling lambat pada hari kerja berikutnya”.

Calon peserta yang dapat diterima sebagai peserta program asuransi kredit adalah semua debitur Perusda BPR Bank Pasar Klaten dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada saat mengajukan kredit usia debitur minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun.
- b. Debitur yang akan diasuransikan harus berada dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam perawatan dokter atau rumah sakit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka. Sub. Bag. Kredit Karyawan Ibu Heny Mulat Rahayu,S.E pada tanggal 25 April 2008 pukul 14.30

“Bahwa asuransi kredit wajib diikuti setiap debitur yang mengambil kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten sejak April 2003, karena sebelum asuransi kredit menjadi wajib, kredit macet di Perusda BPR Bank Pasar Klaten cukup besar. Saat itu penyelesaian kredit bagi debitur yang meninggal dunia hanya dilakukan dengan cara pendekatan kepada keluarga untuk segera melunasi kredit debitur tersebut. Sejak wajibnya asuransi kredit untuk setiap debitur maka penyelesaiannya cukup dengan mengajukan klaim kepada Perusahaan asuransi dan sisa kredit akan dilunasi perusahaan asuransi, sehingga dapat menekan angka kredit macet”.

Data kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten sebelum dan setelah berlaku wajibnya asuransi kredit dapat dilihat di bawah ini:

Kredit	Jumlah Kredit	Jumlah Debitur
Lancar	Rp.21.621.423.795,00	2457
Kurang Lancar	Rp. 138.366.635,00	20
Diragukan	Rp. 238.268.010,00	17
Macet	Rp. 406.479.800,00	240

Data sebelum asuransi kredit bersifat wajib
Sub Bagian Kredit karyawan, Januari 2002

Tabel a

Kredit	Jumlah Kredit	Jumlah Debitur
Lancar	Rp.18.228.941.250,00	2688
Kurang Lancar	Rp. 116.641.600,00	20
Diragukan	Rp. 219.206.200,00	17
Macet	Rp. 358.419.500,00	234

Data setelah asuransi kredit bersifat wajib
Sub Bagian Kredit karyawan, Januari 2004

Tabel b

	Jumlah Debitur	Prosentase
Klaim yang diajukan	5	100 %
Klaim yang terealisasi	5	100 %

Data debitur yang sudah diajukan klaimnya
Sub Bagian Kredit Karyawan, Januari 2008

Tabel c

Berdasarkan tabel a dan tabel b di atas dapat dilihat bahwa besarnya kredit macet sebelum asuransi kredit bersifat wajib diikuti bagi setiap debitur Perusda BPR Bank Pasar Klaten adalah sebesar Rp. 406.479.800,00, jika dibandingkan dengan besarnya kredit macet setelah asuransi kredit bersifat wajib diikuti setiap debitur Perusda BPR Bank Pasar Klaten maka terdapat penurunan besarnya kredit macet. Kredit macet setelah asuransi kredit bersifat wajib adalah sebesar Rp. 358.419.500,00. Terjadinya penurunan besarnya kredit macet dikarenakan sebelum asuransi kredit bersifat wajib ada sebagian debitur yang tidak mengambil asuransi, sehingga apabila debitur meninggal dunia, maka penyelesaian kreditnya tidak melalui pengajuan klaim ke perusahaan asuransi. Upaya yang dilakukan Perusda BPR Bank Pasar Klaten adalah dengan cara kekeluargaan, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada pihak keluarga debitur untuk melanjutkan angsuran kredit dari debitur, apabila pihak keluarga tidak bersedia, maka upaya yang dapat dilakukan Perusda BPR Bank Pasar Klaten adalah melelang barang jaminan kredit debitur.

Terhambatnya pengembalian kredit dari debitur yang meninggal dunia berpengaruh terhadap kegiatan perbankan di Perusda BPR Bank Pasar Klaten dan menambah jumlah kredit macet. Setelah asuransi kredit bersifat wajib untuk setiap debitur di Perusda BPR Bank Pasar Klaten, apabila debitur meninggal dunia sebelum kreditnya lunas maka sisa kredit akan dibayar oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta. Perusda BPR Bank Pasar Klaten akan mengajukan klaim ke AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta. Berdasarkan tabel c dapat diketahui bahwa debitur yang kreditnya sudah diajukan klaimnya ada 5 debitur dan telah mendapatkan pelunasan dari AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta, sehingga pihak debitur tidak dibebani atas pelunasan sisa kredit. Bersifat wajibnya asuransi kredit membantu Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam mengurangi risiko kredit macet, karena apabila calon debitur tidak bersedia mengikuti program asuransi kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten maka tidak akan mendapatkan kredit atau pinjaman. Sejak asuransi kredit bersifat wajib diikuti setiap debitur Perusda BPR Bank Pasar Klaten, asuransi kredit menjadi salah satu alternatif yang digunakan Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam mengatasi risiko kredit macet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka. Bag. Kredit Bapak Edy Priyanto, B.sc pada tanggal 28 Februari 2008 pukul 14.00 wib “bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di BPR Bank Pasar Klaten antara lain:

a. Faktor Internal Bank

- 1) Kelemahan dalam analisa kredit, karyawan (bagian analisis kredit) dalam melakukan analisa kredit tidak akurat atau kurang teliti dan masih kurangnya informasi mengenai data dari debitur yang diperoleh oleh petugas.
- 2) Kelemahan dalam supervisi kredit, Bank lemah dalam melakukan pengawasan terhadap debitur, hal ini disebabkan karena petugas bank yang tidak atau jarang melakukan pengawasan terhadap debitur, atau

kemampuan teknis pegawai bank yang kurang atau faktor sumber daya manusia.

- 3) Bank lemah melakukan penolakan jika ada calon debitur yang ingin mengajukan kredit karena disebabkan adanya hubungan emosional, seperti: adanya memo dari bupati, hubungan kekeluargaan dan adanya hutang budi antara karyawan Perusda BPR Bank Pasar Klaten dengan debitur.
- 4) Nilai agunan yang tidak sesuai dengan jumlah plafond kredit.
- 5) Kecurangan petugas bank, petugas minta hadiah dan atau pegawai bank dengan nasabah melakukan kolusi.
- 6) Realisasi kredit terlambat.
- 7) Bank terlalu besar dalam memberikan kredit atau bank terlalu sedikit dalam memberikan kredit.

b. Faktor Eksternal Bank

1) Dipandang dari sudut Nasabah atau debitur itu sendiri :

- a) Adanya bisnis baru dari debitur yang terkadang debitur belum tahu betul akan risiko dari bisnis baru yang sedang digelutinya nasabah merasa serba tahu.
- b) Debitur meninggal dunia, pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten telah mengasuransikan kredit dari debitur, sehingga sewaktu-waktu debitur meninggal dunia maka pihak perusahaan asuransi yang akan melunasi sisa pinjaman debitur yang meninggal tersebut.
- c) Debitur (PNS) dipecat, sehingga pembayaran angsuran kredit tidak bisa dilakukan melalui mekanisme pemotongan gaji dari debitur tersebut. PNS tersebut harus membuat surat pernyataan yang berisi bahwa dia sanggup untuk melunasi sisa pinjaman beserta bunga dan denda jika ada.
- d) Nasabah memakai agunan milik orang lain dan atau memalsukan surat-surat resmi yang dijadikan jaminan.
- e) Jaminan dijual belikan, sebagai contoh: BPKB disimpan akan tetapi motor dijual.

- f) Nasabah berurusan dengan hukum.
- g) Rencana kredit untuk konsumsi.
- h) Adanya musibah atau bencana alam.

2) Dipandang dari usaha nasabah atau debitur :

- a) Perusahaan debitur mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) yang lemah.
- b) Kondisi hubungan antar karyawan di perusahaan debitur yang kurang harmonis sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan yang menyebabkan hasil dari pekerjaan kurang maksimal. Hal ini pada akhirnya berdampak pada kewajiban yang harus dilakukan debitur untuk melunasi angsuran tiap bulan.
- c) Bahan baku yang digunakan oleh usaha debitur telah usang sehingga berpengaruh pada produksi yang menyebabkan nilai produksi menjadi berkurang. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya kredit macet karena seharusnya debitur mengangsur tetapi karena terjadi suatu hal maka terlambat atau tidak bisa mengangsur.
- d) Adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengakibatkan terhambatnya proses produksi”.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam menyelesaikan kredit macet selain dengan cara pemberian surat pemberitahuan dan surat peringatan adalah sebagai berikut:

- a. *Rescheduling*, yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, kredit yang semula jangka waktunya 30 bulan dirubah menjadi 40 bulan, dengan harapan debitur dapat mengembalikan kreditnya.. *Reconditioning* dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti: kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu hutang pokoknya, pembebasan bunga, dan. Penurunan suku bunga. Suku bunga yang semula sebesar 1,5% diturunkan menjadin 1%.

- b. Pengajuan klaim asuransi kredit kepada AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta bila debitur meninggal dunia sebelum kreditnya lunas agar tidak terjadi kredit macet dan membebani pihak keluarga yang ditinggalkan.
- c. Apabila debitur juga belum memenuhi apa yang diharapkan dari surat pemberitahuan atau panggilan dari Perusda BPR Bank Pasar Kalten maka tahap selanjutnya yaitu dibuatkan surat peringatan I, II, dan surat peringatan terakhir. Dalam surat peringatan juga dicantumkan angsuran pokok yang belum dibayarkan bunga dan denda. Surat peringatan terakhir ada tambahan isi yaitu jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam surat peringatan terakhir maka penagihan selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri Klaten atau KP2LN Cabang Surakarta yang sekarang bernama KPKLN (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Asuransi kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten merupakan salah satu alternatif yang diambil untuk mengatasi risiko yang timbul dalam kredit, yaitu kredit macet yang disebabkan karena debitur meninggal dunia. Asuransi kredit memberikan keuntungan kepada bank dan pihak debitur yang meninggal dunia.

2. Pembahasan.

Lahirnya asuransi kredit didasari pada kata-kata “antara lain” yang terdapat dalam Pasal 247 KUHD. Pasal ini tidak membatasi atau menghalangi lahirnya jenis-jenis asuransi baru yang sesuai dengan perkembangan dunia dan kebutuhan manusia, sedangkan dalam Pasal 268 KUHD diatur tentang syarat-syarat agar suatu kepentingan dapat diasuransikan, antara lain:

- a. Dapat dinilai dengan uang;
- b. Dapat diancam oleh suatu bahaya;
- c. Tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Berdasarkan syarat di atas maka risiko yang diasuransikan dalam asuransi kredit telah memenuhi syarat, karena risiko dalam asuransi kredit tersebut

dapat dinilai dengan uang (yaitu sebesar kredit yang tidak dapat dilunasi oleh debitur). Selain itu juga adanya bahaya yang mengancam, yaitu bahaya yang dapat menyebabkan kredit macet, serta asuransi kredit ini tidak dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa asuransi kredit yang ada di Perusda BPR Bank Pasar Klaten adalah asuransi jiwa kredit yang memberikan proteksi pada kredit yang dikeluarkan oleh bank agar tidak terjadi risiko kredit macet yang disebabkan karena debitur meninggal dunia. Bila debitur meninggal dunia sebelum kreditnya lunas, maka sisa kredit itu akan dilunasi oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta, sedangkan apabila sampai kredit lunas dan atau jangka waktu kredit berakhir maka debitur tidak akan mendapatkan apa-apa dari perusahaan asuransi dan premi yang dibayarkan akan menjadi milik pihak perusahaan asuransi.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten tidak memuat klausula yang mengatur mengenai asuransi kredit tersebut. Dalam hal debitur bersedia untuk diasuransikan, maka sebagai buktinya bank memberikan bukti kwitansi pembayaran premi asuransi. Jika ditinjau dari Pasal 1320 KUHPdata, perjanjian asuransi yang dilakukan oleh bank dengan debitur tersebut sah menurut hukum dengan dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun dalam perjanjian kredit tersebut tidak memuat klausula asuransi kredit tetapi dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis, sehingga dengan dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata maka perjanjian tersebut sah menurut hukum. Adanya kekurangan dalam perjanjian kredit tersebut dengan tidak adanya klausula asuransi kredit. Menurut pendapat penulis secara hukum kedudukan debitur lemah, karena satu-satunya bukti otentik mengenai kepesertaan dalam asuransi hanyalah selembbar kwitansi bukti pembayaran premi yang dikeluarkan oleh bank. Sehingga apabila kwitansi tersebut hilang, pihak keluarga debitur akan kesulitan untuk

membuktikan bahwa debitur adalah peserta asuransi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka. Sub. Bag. Kredit karyawan Ibu Ninik pada tanggal 27 Februari 2008 pukul 14.00 wib

“berkat itikad baik dan keprofesionalan kerja para pihak yang bersangkutan sejak dilakukannya kerja sama antara Perusda BPR Bank Pasar Klaten dengan AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta belum pernah terjadi masalah dalam pengajuan dan pencairan klaim bila debitur yang diasuransikan meninggal dunia”.

Bank dalam memberikan kredit kepada para debitur selalu berprinsip pada prinsip kehati-hatian dan melakukan analisa kredit. Walaupun analisa kredit sudah dilakukan semaksimal mungkin agar kredit-kredit yang telah dikeluarkan dapat kembali sepenuhnya, kemungkinan kredit macet masih saja terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Perusda BPR Bank Pasar Klaten ada beberapa indikator yang dapat dijadikan pedoman bagi penulis untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet, antara lain;

- a) Penerapan prinsip-prinsip kredit dalam melakukan analisis kredit, di dalam Sektor Kredit Karyawan analisis kredit berdasarkan pada prinsip-prinsip kredit kurang begitu diperhatikan, karena yang terpenting berpedoman pada gaji atau penghasilan PNS tersebut tiap bulan, seperti pada hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Analisis Kredit Ibu Dewi Ekosari K,S.E, MM, pada tanggal 28 Februari 2008 pukul 14.30 wib menyatakan:

“bahwa untuk kredit karyawan penerapan prinsip-prinsip kredit dalam melakukan analisis kredit untuk merealisasikan kredit kurang begitu diperhatikan karena yang terpenting berpedoman pada gaji”.

Hal ini berarti dalam pemberian kredit karyawan tidak keseluruhan prinsip kredit diterapkan, pokok pertimbangan dalam realisasi kreditnya adalah *borg* dan jumlah gaji bersih yang diterima oleh calon debitur tersebut tiap bulan mencukupi atau tidak untuk melunasi angsuran tiap bulan. Menurut analisis penulis walaupun tidak terlalu berpegang pada prinsip kredit dalam melakukan analisis kredit maka sikap kehati-hatian

dapat ditunjukkan melalui analisis yang mendalam terhadap gaji bersih yang diterima oleh PNS tersebut guna untuk menentukan kelayakan untuk diberikan kredit, sedangkan untuk sektor kredit umum diterapkan prinsip kredit (5C) dalam analisis kredit. Dalam prakteknya sektor kredit umum yang menggunakan jaminan atau *borg* berupa BPKB realisasinya sangat cepat, karena calon debitur membawa langsung kendaraan yang akan dijadikan sebagai jaminan, sehingga dengan diterapkannya prinsip kredit di sektor kredit umum setidaknya bisa menekan adanya risiko kredit macet jika dibandingkan pada sektor kredit karyawan.

- b) Kewenangan yang memutus atau yang memprakarsai dalam melakukan realisasi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau belum. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa kewenangan untuk memutuskan dalam rangka merealisasikan kredit sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perusda BPR Bank Pasar Klaten. Hal ini yang menjadi kendala adalah kelemahan dari SDM (Sumber Daya Manusia) di Perusda BPR Bank Pasar Klaten.
- c) Kewenangan dalam memutus untuk dilakukan realisasi kredit apakah jumlah plafond sudah disesuaikan dengan jangka waktu dan jaminan yang digunakan. Dalam prakteknya hal ini dapat dipengaruhi hubungan emosional antara calon nasabah dengan pihak bank, sehingga hal ini memberikan kontribusi untuk dapat terjadinya kredit macet.

Berdasarkan analisis penulis, upaya penyelesaian kredit di lingkungan Perusda BPR Bank Pasar Klaten pertama-tama dengan mendasarkan pada Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten Nomor: PD BPR BP/SK/Dir/49/VII/2005 tentang Prosedur Pemberian Kredit di Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten, di dalam BAB VII tentang Penyelesaian Kredit Pasal 11 disebutkan bahwa :

- (a) Nasabah wajib mengangsur sendiri atau melalui potong gaji pokok dan bunga setiap bulan sampai dengan lunas.
- (b) Nasabah yang terlambat menyelesaikan pinjamannya akan dikenakan denda.

Pasal 13 masih dalam peraturan yang sama disebutkan bahwa :

- (1) Nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pinjamannya setelah jatuh tempo akan diberikan surat peringatan atau somasi.
- (2) Apabila tidak ada penyelesaian sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka Bank Pasar akan melaksanakan pelelangan benda jaminan.
- (3) Pelelangan dapat dilakukan di bawah tangan secara terbatas atau lelang umum melalui KP2LN (yang sekarang bernama KPKLN (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Kredit yang mengalami kemacetan seharusnya pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi bank. Berdasarkan analisis penulis dalam prakteknya upaya-upaya yang dilakukan oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet baik di sektor kredit karyawan maupun sektor kredit umum dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

- a) Pendekatan secara personal, yaitu setelah diberikan surat teguran maka debitur didatangi oleh perwakilan dari Perusda BPR Bank Pasar Klaten yang biasanya dilakukan oleh Ka.Sub Bagian Penagihan untuk melakukan pendekatan personal, atau dengan kata lain melakukan penyelesaian secara damai walaupun pada akhirnya dengan menggunakan cara ini berhasil akan tetapi kredit yang di kembalikan tidak bisa diselesaikan oleh debitur seratus persen.
- b) *Rescheduling* (penjadwalan kembali), dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit. Kredit yang semula jangka waktunya 30 bulan dirubah menjadi 40 bulan, dengan harapan debitur dapat mengembalikan kreditnya.
- c) *Reconditioning* (persyaratan kembali), yang dilakukan dengan cara penurunan dan pembebasan suku bunga. Suku bunga yang semula sebesar 1,5% diturunkan menjadi 1%
- d) Pengajuan klaim asuransi kredit kepada AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta bila debitur meninggal dunia sebelum kreditnya lunas agar

tidak terjadi kredit macet dan membebani pihak keluarga yang ditinggalkan.

- e) Upaya pelelangan barang jaminan kredit debitur, baik melalui Pengadilan Negeri Klaten atau KP2LN Cabang Surakarta yang sekarang bernama KPCLN (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Selain melalui KPCLN penjualan barang jaminan ini bisa juga dilakukan dengan cara dibawah tangan, maksudnya tanpa melalui proses hukum, cukup dengan cara ditawarkan kepada debitur agar menjual barang jaminannya sendiri.

Pemberian kredit oleh bank tidak dapat dilakukan tanpa adanya jaminan. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.10 tahun 1998 disebutkan bahwa:

“Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Keyakinan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah dengan disediakannya agunan oleh nasabah debitur sebagai jaminan dikembalikannya kredit yang diterima debitur. Fungsi dari pemberian jaminan tersebut untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut bila debitur cidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dan disepakati dalam perjanjian kredit antara bank dengan debitur serta dengan adanya asuransi kredit yang wajib diambil oleh semua debitur di Perusda BPR Bank Pasar Klaten maka memberikan keyakinan tambahan kepada bank bahwa kredit yang dikeluarkan dapat dikembalikan oleh debitur sehingga tidak mengganggu sirkulasi keuangan bank.

Risiko tidak kembalinya kredit yang dikeluarkan oleh bank, salah satunya dapat disebabkan karena meninggalnya debitur sehingga secara otomatis bank dapat menggunakan surat kuasa menjual agunan debitur untuk

melunasi kredit tersebut. Perusda BPR Bank Pasar Klaten telah melakukan kerjasama dengan AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta dalam hal asuransi kredit sehingga apabila nasabah yang diasuransikan meninggal dunia maka risiko kredit macet dapat dicegah dan pengembalian sisa kredit tersebut akan dilunasi atau dialihkan ke perusahaan asuransi, yaitu AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta. Dalam hal, sisa angsuran dilunasi oleh pihak asuransi maka akan memberikan keuntungan pada Perusda BPR Bank Pasar Klaten dan pihak keluarga yang ditinggalkan oleh debitur yang meninggal dunia tersebut. Bank akan mendapatkan kreditnya lagi dan keluarga yang ditinggalkan tidak akan menanggung sisa pembayaran kredit dari debitur karena sudah ada pihak asuransi yang melunasi sisa kredit dan jaminan atau *borg* akan dikembalikan kepada keluarga debitur yang meninggal dunia tersebut.

Asuransi kredit merupakan salah satu cara yang digunakan oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten untuk mengatasi risiko kredit macet yang mungkin terjadi. Asuransi kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten bersifat wajib bagi semua calon debitur tetapi bila berdasarkan pada Keputusan Direksi Perusda BPR Bank Pasar Klaten No PD.BPR BP/SK/Dir/49/VII/2005 tentang Prosedur Pemberian Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten pada Pasal 9 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap nasabah kredit karyawan, kredit umum, dan kantor kas harian dapat diikutkan asuransi kredit. Dalam pasal ini asuransi kredit tidak bersifat wajib, hal ini berdasarkan kata-kata “dapat diikutkan”. Tapi di dalam prakteknya Perusda BPR Bank Pasar Klaten mewajibkan setiap calon debiturnya untuk ikut dalam program asuransi kredit, karena meninggal dunianya seseorang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya dan apabila yang meninggal itu adalah debitur yang masih mempunyai kredit, maka akan menimbulkan kredit macet dan meninggalkan hutang bagi ahli warisnya. Maka untuk mengalihkan risiko tersebut Perusda BPR Bank Pasar Klaten mengadakan perjanjian asuransi dengan AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta, sehingga apabila terjadi risiko yang diperjanjikan (yaitu meninggalnya debitur sebelum kreditnya lunas) maka

akan mendapat ganti kerugian dari AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta sebesar sisa kredit yang belum dibayarkan oleh debitur yang meninggal dunia tersebut. Asuransi ini memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak, Keuntungan tersebut antara lain:

1. Pihak bank, yaitu Perusda BPR Bank Pasar Klaten akan mendapat pelunasan kredit dari AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta atas sisa pinjaman atau kredit dari debitur yang meninggal dunia tersebut.
2. Pihak keluarga debitur yang meninggal dunia tidak akan menanggung sisa pinjaman atau kredit dari debitur tersebut.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi kredit merupakan salah satu alternatif yang digunakan di Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam mengatasi risiko kredit macet, pihak asuransi akan melunasi sisa pinjaman atau kredit dari debitur jika sesuatu yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi terjadi.

C. Kendala-Kendala yang Dihadapi Perusda BPR Bank Pasar Klaten di dalam asuransi kredit dan Solusinya.

Kendala atau hambatan merupakan hal yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan sesuatu, begitu juga yang dihadapi Perusda BPR Bank Pasar Klaten di dalam asuransi kredit. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kendala-kendala apa yang sebenarnya terjadi di dalam asuransi kredit yang ada di Perusda BPR Bank Pasar Klaten. Kendala-kendala yang ditemukan penulis selama penelitian adalah kendala dalam aspek non yuridis, sedangkan untuk kendala dalam aspek yuridis tidak ditemukan, karena pelaksanaan asuransi kredit sudah sesuai dengan perjanjian asuransi yang dibuat dan disepakati antara Perusda BPR Bank Pasar Klaten dan AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka. Sub. Bag. Kredit Umum Ibu Ninik pada tanggal 26 Februari 2008 pukul 10.00 wib, “kendala-kendala dalam aspek non yuridis tersebut, antara lain”:

1. Kurangnya sumber daya manusia di Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

Kendala disini terjadi ketika banyaknya calon debitur yang mengajukan kredit dan pada saat itu pihak AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta

datang untuk mengambil daftar kepesertaan debitur yang ikut dalam program asuransi kredit, dan ternyata pihak bank belum mendata ulang data debitur yang baru karena sedang sibuk mengurus kredit yang diajukan oleh para calon debitur. Kendala ini terjadi karena kurangnya karyawan di Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

2. kendala dari pihak debitur, kendala-kendala tersebut antara lain:
 - a. Debitur tidak mengetahui tentang program asuransi kredit.
Debitur belum mengetahui tentang keberadaan dan arti penting adanya asuransi kredit, terutama nasabah yang baru pertama kali mengambil kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten.
 - b. Debitur meminta dibuatkan polis asuransi.
Debitur meminta dibuatkan polis sebagai bukti ikut asuransi kredit, bukannya malah diberi kwitansi pembayaran premi yang dikeluarkan oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

Sedangkan solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami dalam asuransi kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten, antara lain:

1. Adanya bantuan dari pihak AJB Bumiputera Cabang Yogyakarta yang pada saat itu datang ke Perusda BPR Bank Pasar Klaten, dimana pegawai dari AJB Bumiputera Cabang Yogyakarta yang datang ke Perusda BPR Bank Pasar Klaten akan membantu memasukkan data atau mendata ulang debitur yang baru ke dalam daftar kepesertaan asuransi.
2. Bagi debitur baru yang belum mengetahui tentang program asuransi kredit, maka petugas bank yang menangani memberikan penjelasan selengkapnya mengenai fungsi dan keuntungan dari asuransi kredit bagi pihak bank dan debitur, sehingga calon debitur bersedia untuk diasuransikan.
3. Adanya penjelasan dari pihak bank bahwa perjanjian asuransi yang dilakukan adalah antara pihak bank dengan perusahaan asuransi, sehingga polis yang ada adalah antara bank dengan perusahaan asuransi. Sedangkan untuk bukti bahwa debitur ikut dalam program asuransi kredit maka bank akan memberikan kwitansi sebagai bukti keikutsertaan debitur dalam asuransi kredit. Kwitansi ini harus disimpan oleh debitur karena akan

menjadi bukti dan salah satu syarat dalam pengajuan klaim apabila debitur meninggal dunia.

Menurut penulis dalam menyelesaikan kendala-kendala yang ada dalam asuransi kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten dapat dilakukan dengan cara pencantuman mengenai ketentuan asuransi kredit dalam perjanjian kredit, sehingga debitur akan mengetahui mengenai asuransi kredit yang ada di Perusda BPR Bank Pasar Klaten dan memberikan perlindungan hukum terhadap debitur. Dicantumkannya Asuransi kredit dalam perjanjian kredit bisa menjadi bukti bahwa debitur di Perusda BPR Bank Pasar Klaten telah ikut dalam program asuransi kredit, karena asuransi kredit wajib diikuti oleh setiap debitur di Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksistensi asuransi kredit sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh bank dalam mengatasi risiko kredit macet, yang mana penelitian dilakukan di Perusda BPR Bank Pasar Klaten. Maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya kredit yang diberikan bank berdasarkan keyakinan bank terhadap kemampuan debitur untuk mengembalikan kreditnya, keyakinan bank diwujudkan dengan adanya jaminan kredit yang disediakan oleh debitur sehingga bila terjadi risiko kredit macet maka bank dapat menggunakan jaminan tersebut untuk menutup kredit debitur. Selain itu, bank dapat melakukan suatu kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk mengalihkan risiko atas kredit yang diberikan oleh bank. Hubungan kerjasama ini didasari pada perjanjian asuransi yang dibuat oleh bank dengan perusahaan asuransi. Perusda BPR Bank Pasar Klaten melakukan hubungan kerjasama ini dengan perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta. Jenis asuransi yang ditawarkan adalah asuransi jiwa kredit yang berfungsi menutup sisa kredit debitur jika debitur tersebut meninggal dunia sebelum kreditnya lunas. Dalam pelaksanaan asuransi kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten, mewajibkan asuransi kredit kepada setiap calon debitur yang akan mengambil kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten dan apabila calon debitur tidak mau ikut dalam program asuransi kredit, maka Perusda BPR Bank Pasar Klaten tidak akan memberikan kreditnya. Asuransi kredit diwajibkan di Perusda BPR Bank Pasar Klaten karena asuransi kredit merupakan salah satu alternatif atau upaya yang digunakan oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam mengatasi risiko kredit macet yang disebabkan karena debitur meninggal dunia sebelum kreditnya lunas, pelunasan atas sisa kredit debitur tersebut akan dilunasi oleh pihak asuransi, yaitu AJB Bumiputera 1912 Cabang

Yogyakarta. Pihak bank tidak akan dirugikan karena kreditnya dapat kembali, sedangkan pihak keluarga debitur yang meninggal dunia tidak akan dibebani pembayaran atas sisa kredit debitur tersebut. Sebelum asuransi kredit bersifat wajib diikuti oleh setiap debitur di Perusda BPR Bank Pasar Klaten, nilai kredit macet di Perusda BPR Bank Pasar Klaten cukup besar dibandingkan dengan nilai kredit macet setelah asuransi kredit bersifat wajib diikuti setiap debitur di Perusda BPR Bank Pasar Klaten, jadi sejak berlaku wajibnya asuransi kredit bagi setiap debitur di Perusda BPR Bank Pasar Klaten mampu mengurangi nilai kredit macet di Perusda BPR Bank Pasar Klaten, karena asuransi kredit merupakan salah satu alternatif yang digunakan oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam mengatasi risiko kredit macet.

2. Pelaksanaan asuransi kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten mengalami beberapa kendala. Adapun kendala yang dialami adalah kendala non yuridis. Kendala-kendala tersebut antara lain: calon debitur tidak mengetahui tentang asuransi kredit, debitur meminta dibuatkan polis, kurangnya karyawan untuk mengurus asuransi kredit. Usaha yang dilakukan Perusda BPR Bank Pasar Klaten untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain: adanya penjelasan dari bagian *customer service* tentang adanya asuransi kredit dan besarnya potongan premi untuk asuransi kredit, adanya penjelasan dari pihak bank bahwa perjanjian asuransi yang dilakukan adalah antara pihak bank dengan perusahaan asuransi sehingga polis yang ada adalah antara bank dengan perusahaan asuransi, adanya bantuan dari pihak AJB Bumiputera dalam memasukkan data atau mendata ulang debitur yang baru ke dalam daftar kepesertaan asuransi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Perusda BPR Bank Pasar Klaten melakukan promosi melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik mengenai asuransi kredit,

agar setiap calon debitur mengetahui tentang asuransi kredit yang ada di Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

2. Perusda BPR Bank Pasar Klaten menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi lain untuk mengatasi risiko kredit macet, bukan hanya dengan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusda BPR Bank Pasar Klaten menambah instalasi komputer, sehingga meningkatkan produktivitas kerja karyawan.
4. Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam memberikan kredit dilakukan secara profesional tanpa melihat hubungan emosional antara pihak bank dengan calon debitur untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet.
5. Perusda BPR Bank Pasar Klaten melakukan training atau pelatihan secara berkala kepada karyawan Perusda BPR Bank Pasar Klaten, seperti mengirimkan delegasi untuk mengikuti seminar tentang perbankan atau mendatangkan tenaga ahli yang berkompeten dalam dunia perbankan untuk memberikan ceramah, sehingga mempunyai dampak positif terhadap kinerja karyawan dan dapat mengangkat reputasi dari Perusda BPR Bank pasar Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Meliala Syamsudin. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty
- H. Budi Untung. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- H.B. Sutopo. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- H.M.N. Purwosutjipto. 1996. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6*. Jakarta: Djambatan
- Johannes Ibrahim. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Persepektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung: mandar Maju
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- _____. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sri Rejeki Hartono. 1985. *Asuransi dan Hukum Asuransi*. Semarang: IKIP Semarang Press
- _____. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 1993. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa
- Syarif Arbi. 2003. *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Jakarta: Djambatan

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 34 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.8 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Klaten

Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten

Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten Nomor: PD BPR BP/SK/Dir/32/VII/2004 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten

Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten Nomor: PD BPR BP/SK/Dir/49/VII/2005 tentang Prosedur Pemberian Kredit di Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten

Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten Nomor: PD BPR BP/Ped/Dir/41/VII/2007 tentang Plafond Kredit dan Borg yang diperlukan pada Sub Bagian Kredit Karyawan

Internet

<http://ipasatucommunity.wordpress.com/2007/08/03/indonesia-muda-dan-kelemahannya/>.....Indonesia adalah negara berkembang (2 oktober 2007 pukul 09.32 wib)

<http://www.bumiputera.com/content.php?id=106> (23 november 2007 pukul 13.30 wib)

<http://www.asei.co.id/produk/ask/Z> (23 november 2007 pukul 14.00 wib)

http://www.car.co.id/produk/korp_askredit.asp (23 november 2007 pukul 14.30 wib)

<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/04/2007/04/26/brk> (25 April 2008 pukul 12.00 wib)

<http://g1s.org/blog/amnesia-kredit-perbankan-802/> (25 April 2008 pukul 12.30 wib)

LAMPIRAN-LAMPIRAN